

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2020

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Syavinnaz Yudhistiara
Nomer Induk Mahasiswa : 18313321
Prodi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2022

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa
Tengah tahun 2016-2020

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Syavinnaz Yudhistiara

Nomer Induk Mahasiswa : 18313321

Prodi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tugas akhir berupa skripsi ini sudah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian-bagian yang dapat digolongkan ke dalam tindak plagiat atau plagiasi seperti yang dimaksudkan dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan yang saya tulis ini tidak benar maka saya sanggup untuk menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Maret 2022

Penulis,



BEAAJX717786779

Syavinnaz Yudhistiara

PENGESAHAN SKRIPSI

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa
Tengah tahun 2012-2020

Nama : Syavinnaz Yudhistiara
Nomer Induk Mahasiswa : 18313321
Prodi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 14 Maret 2022

Telah disetujui untuk diujikan

Dosen Pembimbing



Sahabudin Sidiq, Dr., S.E., M.A.

NIP: 933130102

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2020

Disusun oleh : SYAVINNAZ YUDHISTIARA

Nomor Mahasiswa 18313321

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 08 April 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Sahabudin Sidiq, Dr., MA.

Penguji : Aminuddin Anwar, SE.,M.Sc.


.....

.....



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat, dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Penelitian ini merupakan suatu bentuk karya perjuangan di akhir kuliah yang penulis dedikasikan untuk keluarga penulis tercinta khususnya Ayah, Ibu dan Adik. Terimakasih untuk segala kasih sayang, kesabaran, kepercayaan, dukungan dan doa tulus yang selalu diberikan dalam langkah demi langkah hidup penulis.

Penulis juga mendedikasikan karya ini untuk semua pihak yang telah membantu penulis dari awal kuliah hingga dapat menyelesaikan karya ini seperti dosen pembimbing, dosen mata kuliah, staff dan pastinya teman-teman terdekat penulis selama kuliah yang selalu memberikan bantuan serta dukungan untuk penulis dari awal kuliah hingga selesainya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT untuk karunia, berkah dan rahmat-Nya yang melimpah sehingga skripsi ini yang berjudul “**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2020**” dapat terselesaikan dengan baik.

Menyadari keterbatasan dari penulis, proses untuk menyelesaikan skripsi ini mendapatkan banyak bantuan dari pihak-pihak terkait. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan yang selalu mengalir diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa terimakasihnya kepada:

1. Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Drs. Agus Widarjono, MA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Sahabudin Sidiq, MA selaku Ketua Prodi Studi Ekonomi Pembangunan Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia serta selaku pembimbing dalam penelitian ini yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan penelitian ini.
4. Seluruh dosen dan karyawan pada Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia untuk seluruh ilmu, bimbingan dan bantuan hingga penulis selesai dalam penyusunan penelitian ini.
5. Keluarga penulis tercinta R. Dwi Yuli Riyanto selaku Ayah, Mulyati Farianingsih selaku Ibu, dan Syavira Annastasya selaku adik atas dukungan yang tidak pernah kurang diberikan untuk penulis dalam bentuk materil maupun non-materil. Semoga dengan ini penulis dapat sukses dan lebih mengangkat derajat keluarga, amin.

6. Mbah Putri dari penulis yang selalu bangga dengan apa yang dilakukan penulis, yang selalu memberikan nasihat, doa, dukungan yang tidak terduga agar penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Pembangunan.
7. Sahabat dari smp serta Teman-teman dekat semasa perkuliahan penulis untuk segala bentuk dukungan berupa canda tawa, tangis, susah, dan senang. Semoga kita Menjadi Orang yang Sukses dalam dunia kerja, pertemanan, keluarga, dan akhirat.

Terimakasih juga penulis ucapkan untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu di atas untuk segala kontribusi, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis sehingga karya ini dapat selesai. Semoga karya penelitian skripsi ini dapat berguna serta membawa manfaat dan kebaikan bagi para peneliti lainnya dan praktisi terkait.

Yogyakarta, 3 Februari 2022

Penulis



Syavinnaz Yudhistiara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
<i>1.1 Latar Belakang</i>	<i>1</i>
BAB II.....	13
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	13
<i>2.1 Kajian Pustaka.....</i>	<i>13</i>
2.2 Landasan Teori	20
2.2.1 Pengangguran	20
2.2.2 Upah Minimum	23
2.2.3 Inflasi.....	24
2.2.4 Laju Pertumbuhan PDRB	27
2.3 Kerangka Pemikiran	30
2.4 Hipotesis	31
BAB III	32

METODE PENELITIAN	32
3.1 <i>Jenis dan Cara Pengumpulan Data</i>	32
3.2 <i>Definisi Operasional Variabel.....</i>	32
3.3 <i>Metode Analisis.....</i>	34
3.4 <i>Pemilihan Model.....</i>	35
3.4.1 <i>Chow test (uji chow)</i>	35
3.4.2 <i>Hausman test (uji hausman)</i>	36
3.5 <i>Estimasi Model Terbaik</i>	37
3.5.1 <i>Koefisien Determinasi (R^2).....</i>	37
3.5.2 <i>Uji Serentak (Uji f).....</i>	37
3.5.3 <i>Uji Statistik (Uji t).....</i>	38
BAB IV.....	39
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 <i>Deskripsi Data Penelitian.....</i>	39
4.2 <i>Hasil dan Pemilihan Model Terbaik</i>	41
4.2.1 <i>Uji Chow Test.....</i>	41
4.2.2 <i>Uji Hausman Test</i>	42
4.3 <i>Model Regresi Random Effects Model.....</i>	43
4.4 <i>Analisis Regresi Model</i>	44
4.4.1 <i>Koefisien Determinasi (R-squared).....</i>	44
4.4.2 <i>Uji Serentak (Uji F).....</i>	45
4.5 <i>Analisis antar Kabupaten/Kota.....</i>	47
4.6 <i>Pembahasan.....</i>	48
BAB V	51
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	51
5.1 <i>Kesimpulan</i>	51
5.2 <i>Implikasi</i>	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia 2012-2020	2
Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa 2012-2020	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	40
Tabel 4.2 Hasil <i>Uji Chow Test</i>	41
Tabel 4.3 Hasil <i>Uji Hausman Test</i>	42
Tabel 4.4 Hasil Pengujian <i>Random Effects Model</i>	43
Tabel 4.5 Hasil Koefisien Determinasi (<i>R-Squared</i>).....	44
Tabel 4.6 Hasil Uji Serentak (uji f).....	45
Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik (Uji t)	45

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Upah Minimum di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2020	5
Grafik 1.2 Tingkat Inflasi di Provinsi Jawa tengah tahun 2012-2020	7
Grafik 1.3 Laju Pertumbuhan PDRB (atas harga konstan 2010) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2020	8
Grafik 4.1 Intersep Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2012-2020.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Hasil Analisis Statistik Deskriptif	55
Lampiran II: Hasil Regresi <i>Common Effects Model</i>	56
Lampiran III: Hasil Regresi <i>Fixed Effects Model</i>	57
Lampiran IV: Hasil Regresi <i>Random Effects Model</i>	59
Lampiran V: Hasil Uji Chow Test.....	61
Lampiran VI: Hasil Uji Hausman Test.....	62
Lampiran VII: Perbedaan intersep antar kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.....	63
Lampiran VIII: Data Penelitian	64

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh yang ditimbulkan dari variabel upah minimum, inflasi, dan laju pertumbuhan PDRB terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat analisis berupa regresi data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* dari tahun 2012 hingga 2020 dan data *cross section* dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Model terbaik pada hasil penelitian ini adalah *Random Effects Model (REM)* yang menyatakan bahwa variabel inflasi dan laju pertumbuhan PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pada variabel upah minimum, hasil menyatakan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah pada periode penelitian.

Kata Kunci: Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, Inflasi, dan Laju Pertumbuhan PDRB.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki kondisi yang tergolong sebagai negara berkembang. Kondisi ini didasari dari adanya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di dalam negara. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia masih memiliki banyak masalah ekonomi social didalamnya dan dengan berkembangnya teknologi serta zaman, masalah-masalah yang terjadi menjadi lebih kompleks. Permasalahan tersebut tidak akan pernah lepas dari hubungan antara negara dengan rakyatnya. Sehingga, secara keseluruhan sebagai negara berkembang, Indonesia dapat dikatakan masih bermasalah pada belum maksimalnya pembangunan ekonomi di dalamnya. Pembangunan ekonomi merupakan suatu kondisi dimana negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh beberapa aspek yang berubah dalam perekonomian. Tujuan adanya pembangunan ekonomi sendiri yaitu kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya meningkat sehingga dapat lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan untuk jumlah penduduk yang tinggi seperti Indonesia. Salah satu indicator yang dapat memperlihatkan kesejahteraan masyarakat di negaranya adalah jumlah pengangguran yang ada.

Apabila suatu negara memiliki peningkatan jumlah pengangguran maka pembangunan ekonomi di negara tersebut sedang tidak stabil atau kesejahteraan masyarakatnya kurang dan sebaliknya, apabila suatu negara memiliki penurunan jumlah yang menganggur maka negara tersebut dapat dikatakan sejahtera. Di negara Indonesia, masalah perekonomian yang sangat sulit diatasi di Indonesia adalah pengangguran. Hal ini terlihat jelas dari adanya tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahunnya yang masih tinggi dan cenderung mengalami fluktuasi.

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia 2012-2020

Tahun	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) %
2012	6.14
2013	5.92
2014	5.94
2015	6.18
2016	5.61
2017	5.33
2018	5.34
2019	5.28
2020	7.07

Sumber: *Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020*

Pengangguran di Indonesia sampai saat ini berdasarkan data dapat dikatakan masih menjadi sebuah masalah ekonomi social yang belum dapat diselesaikan bahkan cenderung berlarut pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Adanya kondisi presentase pengangguran yang tinggi membawa efek atau dampak buruk bagi sektor perekonomian negara, namun sebaliknya apabila persentase pengangguran suatu negara rendah, maka negara tersebut menunjukkan adanya kondisi baik dalam pertumbuhan ekonomi sehingga kualitas hidup masyarakatnya dapat meningkat. Adanya pengangguran di suatu negara dapat diakibatkan dari berbagai macam factor. Di Indonesia, tingkat penganggurannya yang tinggi dapat diperkirakan dari jumlah lapangan pekerjaan didalamnya tidak lebih banyak dari jumlah angkatan kerjanya atau dapat dikatakan jumlah permintaan dan penawaran atas tenaga kerjanya tidak seimbang. Akibat dari hal tersebut adalah pertumbuhan tenaga kerja lebih tinggi dan cepat dibandingkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Masalah pengangguran ini merupakan masalah yang sulit diatasi oleh negara-negara berkembang. Mengatasi

adanya pengangguran di sebuah negara bukan hal yang mudah karena pengertian secara umum pengangguran yaitu kondisi dimana seseorang atau masyarakatnya sedang tidak bekerja atau dalam tahap mencari pekerjaan. Hal ini berkaitan dengan adanya jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja di dalamnya pun juga akan meningkat sehingga menyebabkan bertambahnya masyarakat yang mencari pekerjaan.

Pengangguran terbuka merupakan jenis pengangguran dimana orang tersebut tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Kondisi dari pengangguran terbuka adalah tidak memiliki penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehingga dapat dikatakan menjadi tambahan beban bagi keluarga dan masyarakat lainnya. Pengangguran merupakan masalah yang terjadi di lingkup yang luas maupun kecil seperti nasional maupun regional seperti Pulau Jawa. Didalamnya, Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Daerah tersebut juga merupakan sebuah representasi dari pembangunan Indonesia yang masih memiliki banyak hambatan ataupun gangguan untuk mengatasi masalah pengangguran. Dengan adanya hal itu, didapatkan data bahwa persentase pengangguran terbuka di Pulau Jawa sendiri tinggi atau masih belum kondusif sehingga belum menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dimana tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2012 hingga 2020 masih mengalami fluktuasi. Seperti yang tertera dalam tabel 1.2:

**Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa
tahun 2012-2020**

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jawa Barat	9.08	9.16	8.45	8.72	8.89	8.22	8.23	8.04	10.4
Jawa Tengah	5.61	6.01	5.68	4.99	4.63	4.57	4.47	4.44	6.48
DIY	3.90	3.24	3.33	4.07	5.61	3.02	3.35	3.18	4.57
Jawa Timur	4.11	4.30	4.19	4.47	4.21	4.00	3.99	3.82	5.84

Banten	9.94	9.54	9.07	9.55	8.92	9.28	8.47	8.11	10.6
DKI Jakarta	9.67	6.01	5.68	4.99	6.12	7.14	6.24	6.54	10.9

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020

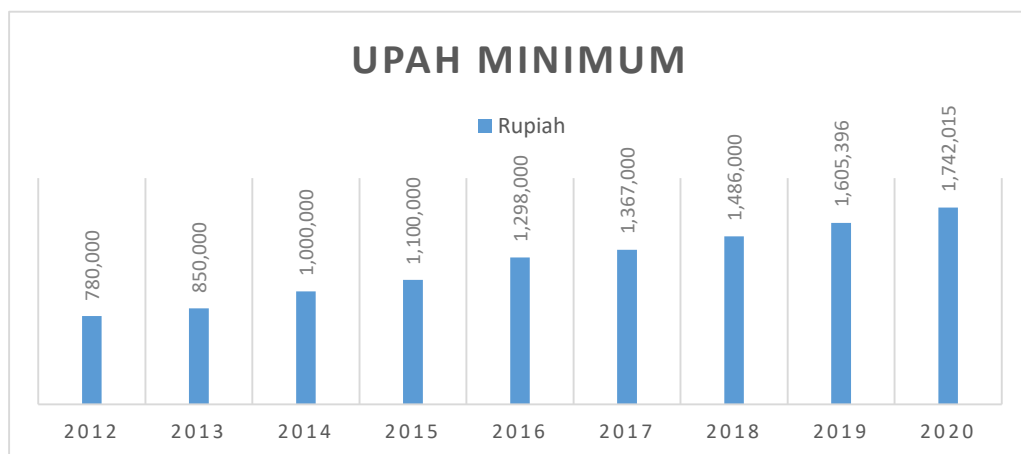
Tabel 1.2 menunjukkan persentase 6 provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi, namun Provinsi Banten terlihat sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka yang cenderung paling tinggi selama periode tersebut dibandingkan provinsi lainnya. Sedangkan provinsi lainnya, walaupun tidak setinggi Provinsi Banten, namun tingkat pengangguran terbukanya masih menunjukkan persentase yang dapat dikatakan cukup tinggi. Dengan jumlah penduduk di Jawa yang mencapai angka sekitar 150 juta jiwa, sesuai persentase tabel di atas diketahui bahwa masyarakatnya masih ada yang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya tingkat pengangguran, diantaranya adalah upah minimum, inflasi, dan tingkat laju pertumbuhan PDRB.

Pemerintah yang berwenang di pusat ataupun daerah telah mengusahakan berbagai cara dan kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran ini, namun dapat dikatakan masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakatnya. Kemudian, kondisi di lapangan pun kurang mendukung untuk pengangguran karena faktanya laju peningkatan kesempatan kerja lebih kecil dibandingkan laju peningkatan pencari kerjanya. Khususnya di Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan angkatan kerjanya menunjukkan kenaikan setiap tahunnya sedangkan kesempatan kerjanya kecil sehingga tidak dapat menyerap seluruh angkatan kerja di dunia kerja. Dari hal itu lah, tingkat pengangguran terbuka masih mengalami fluktuatif walaupun tidak terlalu besar setiap tahunnya di Provinsi Jawa Tengah. Dampak yang dapat ditimbulkan dari tingginya pengangguran terbuka selain kondisi sosial yaitu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi maupun politik. Pada tabel 1.2 bagian Provinsi Jawa Tengah memperlihatkan bahwa dari tahun 2012 hingga 2014, tingkat pengangguran terbuka cenderung fluktuatif dengan persentase yang tinggi sedangkan dari tahun 2015 hingga 2019, tingkat pengangguran terbukanya mengalami sedikit penurunan walaupun kurang

signifikan. Pada penelitian ini, penulis akan meneliti beberapa faktor yang diduga mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Faktor-faktor yang akan diteliti yaitu seperti upah minimum, inflasi, dan Laju pertumbuhan PDRB.

Pertama, mengenai upah. Secara umum, upah berkaitan dengan pengangguran ketika upah yang diterima masyarakat hasil dari pekerjaannya rendah atau kecil, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingginya tingkat pengangguran terbuka. Upah dapat dikatakan suatu hasil yang didapatkan seseorang setelah bekerja yang diberikan dari produsen atau pemilik perusahaan. Upah memiliki titik minimum yang disebut sebagai upah minimum. Peraturan Pemerintah no. 78 tahun 2015 pada pasal 41 menyatakan bahwa upah minimum dapat diartikan sebagai upah terkecil yang hanya terdiri dari upah pokok tidak dicampur tunjangan. Di sebuah daerah, upah minimum dibagi menjadi dua yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Penetapan adanya upah minimum ini akan berbeda disetiap daerahnya karena menyesuaikan dengan harga-harga kebutuhan pokok dan biaya hidup di daerah tersebut. Upah Minimum Provinsi (UMP) akan ditentukan oleh Gubernur, sedangkan Upah Minimum Kota/Kabupaten akan ditentukan oleh Bupati atau Wali Kota setempat.

Grafik 1.1 Upah Minimum di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2020

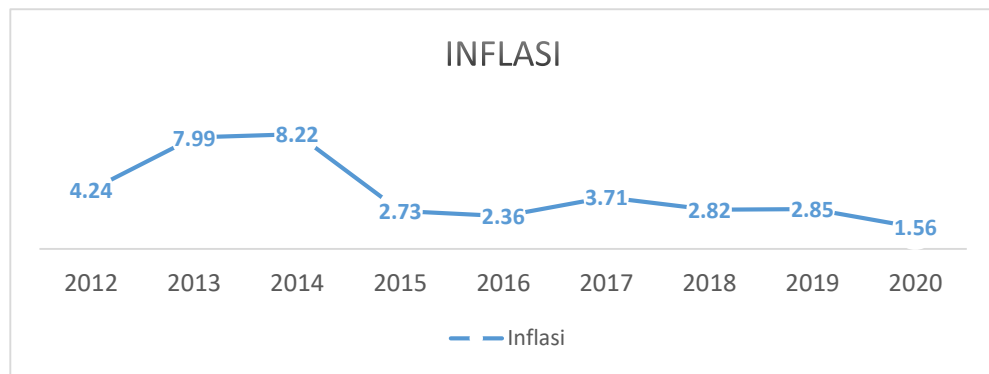
Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi yang memiliki tingkat upah terendah khususnya di Pulau Jawa dan bahkan di Indonesia. Berdasarkan grafik diatas, upah minimum di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Kenaikan ini terjadi bersangkutan dengan harga barang pokok di kota-kota tersebut yang cenderung naik. Upah minimum ini merupakan alat yang efektif untuk mengontrol para buruh. Selain menjadi alat kontrol, tingkatan upah juga menjadi sebuah faktor yang penting untuk menentukan kualitas serta taraf hidup masyarakatnya. Namun, walaupun upah minimum mengalami kenaikan setiap tahunnya, upah tersebut masih tergolong rendah hingga upah minimum di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 masih hanya sebesar Rp 1.742.015.

Upah minimum yang dibayarkan setiap perusahaan memiliki tingkatan yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Jika para buruh atau pekerja merasa kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan penghasilan yang mereka diterima, maka para buruh tersebut akan mengadakan musyawarah untuk menuntut adanya kenaikan yang sebanding. Dengan adanya kondisi seperti itu, dapat disimpulkan apabila perusahaan tidak dapat membayarkan upah yang sebanding dengan permintaan buruh, maka perusahaan akan cenderung melakukan PHK dan menyebabkan pengangguran meningkat. Kondisi lain yang dapat menyebabkan pengangguran meningkat berkaitan dengan upah adalah adanya kenaikan upah yang diakibatkan dari inflasi. Adanya inflasi mendorong permintaan akan barang menurun sehingga ini mendorong perusahaan mengurangi atau meminimalisasi biaya produksi dengan mengurangi jumlah pekerjanya. Dari hal tersebut akan menyebabkan tingkat pengangguran meningkat.

Indikator kedua yang mendasar dalam pengangguran adalah inflasi. Inflasi secara umum dapat dikatakan sebagai kondisi dimana harga barang umum produksi mengalami kenaikan terus menerus pada periode tertentu. Inflasi yang terjadi di suatu wilayah akan berdampak pada indikator lain dalam perekonomian dan kondisi wilayah tersebut. Inflasi memiliki keterkaitan dengan pengangguran. Kaitannya adalah pada

saat tingkat inflasi suatu daerah tinggi maka hal tersebut akan menyebabkan menurunnya peluang lapangan pekerjaan di daerah tersebut. Kondisi ini diperjelas pada saat tingkat inflasi tinggi, hal ini dapat mengakibatkan adanya perubahan harga-harga barang maupun jasa. Dengan meningkatnya harga barang atau jasa, maka permintaan akan barang atau jasa itu pun menurun sehingga produsen cenderung menurunkan biaya produksinya dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Dari kondisi inilah, permintaan akan tenaga kerja berkurang atau menurun sehingga pengangguran pun mengalami peningkatan. Pada Pulau Jawa, inflasi masih tergolong aman seperti tabel dibawah ini.

Grafik 1.2 Tingkat Inflasi di Provinsi Jawa tengah tahun 2012-2020



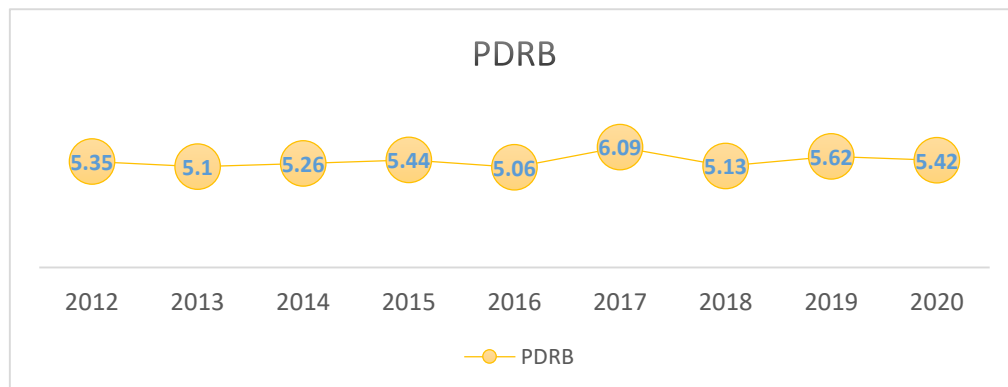
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020

Tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan di setiap tahunnya. Provinsi Jawa tengah mengalami kenaikan inflasi yang signifikan pada tahun 2013 dan 2014 dengan besaran inflasinya mencapai 7.99 sampai 8.22 persen. Besarnya kenaikan inflasi pada dua tahun tersebut disebabkan karena adanya fenomena El-Nino dimana Provinsi Jawa Tengah mengalami gangguan pada sektor pertanian secara besar sehingga terjadi kegagalan panen dan gagal produksi pangan. Dari adanya hal ini menyebabkan komoditas besar di sektor pertanian pada tahun tersebut menyumbang besar inflasi yang terjadi. Namun mulai tahun 2015 hingga 2020 kondisi telah membaik dan mulai terjadi penurunan hingga fluktuasi yang tidak terlalu tajam. Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi yang mengalami inflasi sedang ke ringan pada periode ini.

Penyebab tinggi rendahnya tingkat inflasi ini biasanya karena adanya tarikan permintaan (*demand pull*) dan dorongan biaya (*cost push*).

Indicator yang terakhir adalah laju pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu factor yang berpengaruh terhadap adanya tingkat pengangguran di suatu wilayah. Adapun pengaruh yang dapat ditimbulkan yaitu tingkat pengangguran dapat diatasi melalui pengelolaan perekonomian yang baik atau dengan cara yang menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik di daerah maupun nasional Indonesia. Ketika tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi, hal tersebut akan menumbuhkan kesempatan berkembang bagi perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat lebih meluaskan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja. Selain berpengaruh pada pengangguran, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indicator dari keberhasilan ekonomi suatu negara seperti apabila pertumbuhan ekonomi tinggi, maka kualitas dan perekonomian daerah tersebut aman dan baik. Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak tinggi, maka kondisi ini akan mengakibatkan permintaan barang dan jasa di pasar menurun sehingga dapat mengurangi produksi dan produsen mengurangi biaya produksi tersebut dengan melakukan mengurangi tenaga kerja yang menyebabkan pengangguran akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dicerminkan sejahtera apabila angka pengangguran daerah tersebut rendah.

Grafik 1.3 Laju Pertumbuhan PDRB (harga konstan 2010) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2020

Grafik di atas memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan PDRB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode penelitian tahun 2012 hingga 2020 mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 5.38 persen. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 6.09 persen. Sedangkan laju pertumbuhan terendahnya terjadi pada tahun 2016 sebesar 5.06 persen. Tingginya persentase pada tahun 2017 dikarenakan beberapa kondisi nasional dan regional yang saling berkaitan dengan pertumbuhan ekonominya dan adanya kondisi pada Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kemajuan pada sektor industri pengolahan terutama garmen.

Berdasarkan uraian dan pemaparan latar belakang di atas, adapun alasan sehingga penulis memilih topic ini yaitu yang pertama, pengangguran merupakan sebuah masalah dalam lingkup perekonomian di nasional maupun regional yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara maksimal dengan kebijakan ataupun yang lainnya. Kedua, pengangguran dapat dikatakan sebagai beban yang ditanggung oleh masyarakat maupun negara sehingga harus diatasi dengan tepat agar populasinya tidak bertambah. Kemudian alasan penulis memilih daerah Provinsi Jawa Tengah adalah yang pertama, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi di Pulau Jawa yang tergolong memiliki perekonomian yang rendah dengan jumlah kabupaten dan kotanya terbanyak atau sebesar 35 Kabupaten dan Kota. Kedua, Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ke empat rata-rata tingkat pengangguran terbukanya selama periode dengan nilai sebesar 5.2 persen.

Ketiga, persentase yang ditunjukkan Provinsi Jawa Tengah pada tingkat pengangguran terbukanya cenderung naik turun yang tergolong tinggi namun perubahan setiap tahunnya tidak terlalu signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa di Provinsi Jawa Tengah, tingkat pengangguran terbukanya memiliki persentase yang tinggi setiap tahunnya dan cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah juga menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di daerahnya tergolong tinggi dan mengalami kondisi dimana ada

ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerjanya dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia didalamnya. Dari alasan-alasan diatas, penulis memiliki rasa ingin tahu untuk mengetahui serta meneliti penelitian ini yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa tengah tahun 2012-2020”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisa adanya pengaruh yang ditimbulkan dari upah minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah
2. Menganalisa adanya pengaruh yang ditimbulkan dari inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah
3. Menganalisa adanya pengaruh yang ditimbulkan dari laju pertumbuhan PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penulis dapat menambah wawasan dan pemahaman terkait masalah perekonomian khususnya factor-faktor yang mempengaruhi pengangguran di Provinsi Jawa Tengah yang setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan.
2. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi penulisan yang berguna bagi penelitian lain bagi mahasiswa atau peneliti lainnya.

3. Penelitian ini digunakan sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program S1 Ekonomi Pembangunan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan adanya Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta adanya Sistematika Penulisan

Bab II. Kajian Pustaka

Bab ini berisikan hasil pengkajian dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta akan berisikan landasan teori-teori yang dapat digunakan untuk lebih mendekati permasalahan yang akan diteliti.

Bab III. Metode Penelitian

Menjelaskan terkait data yang akan dipakai, bagaimana mengumpulkan data, definisi operasional variabel, dan jenis metode untuk analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab IV. Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab ini akan berisikan penjelasan hasil-hasil dari analisis data yang telah dilakukan peneliti sehingga terdapat juga penjelasan tentang perhitungan statistic dari masing-masing variabel yang diteliti.

Bab V. Simpulan dan Implikasi

Pada bab ini akan berisikan kesimpulan terakhir dari penelitian yang telah dilakukan dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Bab ini juga akan memberikan implikasi kebijakan yang dapat digunakan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah.

Bagian Akhir

Bagian akhir dari penelitian ini terdiri dari dua hal, yaitu Daftar pustaka yang menjadi referensi penulisan skripsi ini. Dan lampiran yang berisikan keterangan-keterangan lain terkait penulisan yang berfungsi untuk melengkapi uraian-uraian yang disajikan dalam bagian inti penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Setiawan dan Putro (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui adanya pengaruh PDB, upah, inflasi dan beban/tanggungan penduduk terhadap pengangguran terbuka di Kota Magelang. Metode yang digunakan peneliti adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data sekunder time series tahun 1990-2010 yang diperoleh dari BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam uji simultan (uji f), variabel secara keseluruhan seperti PDB, inflasi, upah minimum, dan beban/tanggungan penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap adanya tingkat pengangguran terbuka di Kota Magelang pada periode penelitian.

Lindiarta (2014) memaparkan bahwa penelitian yang dilakukannya memiliki tujuan untuk mengetahui adanya pengaruh tingkat upah minimum, inflasi, dan jumlah penduduk terhadap pengangguran di Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah analisis regresi linear berganda dengan data time series dari tahun 1996 hingga 2013. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pada variabel upah minimum memiliki pengaruh negative yang tidak signifikan terhadap variabel pengangguran, kemudian pada variabel inflasi menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan terhadap pengangguran, dan pada variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh negative yang tidak signifikan terhadap pengangguran. Namun secara simultan, variabel upah minimum, inflasi, jumlah penduduk dapat dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran di Kota Malang periode tahun 1996 hingga tahun 2013.

Wardiansyah, dkk (2016) menjabarkan penelitian yang mereka lakukan bertujuan untuk mengetahui adanya perkembangan tingkat pengangguran di semua Provinsi Sumatera dan untuk mengetahui pengaruh dari upah serta pertumbuhan

ekonomi terhadap tingkat pengangguran pada Provinsi Sumatera. Metode yang digunakan peneliti adalah analisis regresi data panel pada variabel upah dan pertumbuhan ekonomi serta deskriptif kuantitatif pada variabel perkembangan tingkat pengangguran. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel atau data time series selama 5 tahun dari tahun 2009 hingga tahun 2013 yang diperoleh dari berbagai institusi pemerintah terkait terutama dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independent antara lain upah minimum dan Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi Sumatera sama-sama memiliki pengaruh signifikan secara negatif terhadap tingkat pengangguran provinsi Sumatera.

Widiyati (2016) menjelaskan penelitiannya ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh yang dapat ditimbulkan dari pertumbuhan ekonomi (PDRB), tanggungan penduduk, upah minimum kota, dan Inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di kota-kota Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan peneliti adalah Random Effect Model (REM) dengan menggunakan data panel dengan rincian *time series* pada tahun 2008 hingga 2013 dan cross section 6 kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji F variabel PDRB, tanggungan penduduk, upah minimum kota, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran sedangkan berdasarkan uji pengaruh validasi atau uji t variabel PDRB berpengaruh secara positif namun tidak signifikan, upah minimum kota berpengaruh negative signifikan dan inflasi berpengaruh secara negative serta tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kota-kota Provinsi Jawa Tengah.

Hartanto dan Masjkuri (2017) telah melakukan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum, dan PDRB terhadap jumlah pengangguran di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode data panel gabungan (*pooled data*) dari data time series yang dimulai dari tahun 2010 sampai tahun 2014 dan data cross section. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada

variabel pendidikan dan PDRB memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap jumlah pengangguran di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur sedangkan pada variabel upah minimum menunjukkan arah negative serta tidak berpengaruh secara signifikan dengan jumlah pengangguran di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur.

Fauziyah (2018) mengungkapkan penelitiannya yang dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel independent seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan penanaman modal dalam negeri mempengaruhi variabel dependennya yaitu tingkat pengangguran terbuka atau tidak. Setelah melakukan penelitian dengan metode regresi data panel, didapatkan model terbaik dalam penelitian yaitu *fixed effects model* yang menghasilkan kesimpulan bahwa variabel independennya seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya yaitu tingkat pengangguran terbuka.

Pramastuti (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dari data panel yang dimiliki yaitu 5 tahun *time series* dan 35 kabupaten/kota *cross section*nya menghasilkan kesimpulan bahwa penelitiannya tepat menggunakan model *fixed effects model* dan variabel-variabel independennya seperti laju pertumbuhan PDRB dan Upah Minimum berpengaruh signifikan sedangkan variabel Inflasi tidak berpengaruh serta tidak signifikan terhadap variabel dependennya yaitu tingkat pengangguran terbuka. Namun, saat secara bersamaan, ketiga variabel tersebut dapat disimpulkan berpengaruh terhadap pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Setyaningrum, dkk (2020) penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan peneliti adalah analisis regresi linear, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data panel *time series* tahun 2012 hingga tahun 2019 yang diambil dari BPS serta instansi terkait. Hasil dari penelitian ini didapatkan

bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat pengangguran sedangkan variabel indeks pembangunan manusia dan inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Variabel Dependent	Variabel Independent	Kesimpulan
Setiawan dan Putro (2013)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	PDRB, UMK, Tingkat Inflasi, dan Beban/ Tanggungan Penduduk	Secara uji simultan (uji f) didapatkan bahwa semua variabel independent seperti PDRB, upah, inflasi, tanggungan penduduk) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent (pengangguran)
Lindiarta (2014)	Pengangguran	Upah Minimum, Inflasi, dan Jumlah Penduduk	Variabel upah memiliki pengaruh negative tidak signifikan, kemudian variabel inflasi memiliki pengaruh positif yang signifikan, dan variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh negative yang signifikan terhadap pengangguran di Kota Malang periode 1996-2013. Sedangkan secara simultan, dapat dikatakan semua variabel independent

			berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent.
Wardiansyah, dkk (2016)	Tingkat Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Upah	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel independent yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan upah memiliki pengaruh negative yang signifikan terhadap adanya tingkat pengangguran.
Widiyati (2016)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	UMK, Tanggungan penduduk, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Berdasarkan uji f, semua variabel independent memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependent. Sedangkan berdasarkan uji t, variabel PDRB berpengaruh secara positif tidak signifikan, upah minimum berpengaruh negative signifikan, tanggungan penduduk berpengaruh positif secara signifikan dan inflasi berpengaruh negative tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Hartanto dan Masjkuri (2017)	Pengangguran	Jumlah penduduk, Upah Minimum, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Hasil menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh secara positif signifikan sedangkan variabel upah minimum menunjukkan arah negative serta tidak berpengaruh secara signifikan dengan jumlah pengangguran di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur.
Fauziah (2018)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, UMP, dan PMDN	Hasil menunjukkan bahwa pada periode 2010-2015, dengan menggunakan data panel model <i>fixed effects</i> , tingkat pengangguran di Pulau Jawa dipengaruhi oleh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi dan Penanaman Modal Dalam Negri
Pramastuti (2018)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Laju Pertumbuhan PDRB, Upah Minimum, dan Inflasi	Hasil dari penelitian yang menggunakan data panel periode 2011-2015 pada 35 kabupaten /kota di Provinsi Jawa Tengah ini menghasilkan model yang tepat yaitu <i>fixed effects model</i> yang

			menyimpulkan bahwa variabel laju pertumbuhan PDRB dan Upah Minimum berpengaruh secara signifikan, sedangkan inflasi tidak. Namun, secara bersamaan, ketiganya memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015.
Setyaningrum, dkk (2020)	Pengangguran	Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Inflasi	Hasil menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang tidak signifikan sedangkan variabel IPM dan inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran

Adanya kajian penelitian terdahulu seperti diatas menambah referensi bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Adapun beberapa perbedaan penelitian yang dilakukan ini dengan 6 penelitian sebelumnya yaitu pertama, pada variabel yang diuji. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independent seperti upah minimum, inflasi, dan laju pertumbuhan PDRB sedangkan penelitian-penelitian terdahulu ada beberapa variabel yang berbeda yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, dan tanggungan penduduk. Kemudian, pembaruan yang ada di penelitian ini dibandingkan peneliti-peneliti sebelumnya adalah lingkup variabel dan tahun

penelitian dimana peneliti menggunakan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan kurun waktu tahun 2012 hingga 2020.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengangguran

Menurut Sumarsono (2009) Pengangguran merupakan kondisi dimana seseorang yang telah memasuki usia angkatan kerja belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan secara aktif. Angkatan kerja sendiri terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berusia antara 15 tahun hingga 64 tahun. Menurut beberapa ahli ekonomi, pengangguran adalah masalah ekonomi makro yang sulit dihadapi dan dapat mempengaruhi pelaku ekonomi secara langsung sehingga pengangguran harus diselesaikan secara bijak dengan kebijakan yang tepat.

Pengangguran memiliki banyak jenis. Menurut Sukirno (2013) berdasarkan penyebabnya pengangguran digolongkan menjadi:

1. Pengangguran Friksional. Pengangguran ini merupakan jenis pengangguran sementara waktu atau sedang menunggu panggilan kerja. Pengangguran friksional disebabkan oleh adanya perpindahan orang-orang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya.
2. Pengangguran Stuktural. Pengangguran jenis ini disebabkan dari adanya perubahan struktur ekonomi suatu daerah sehingga menimbulkan adanya pelemahan di lain bidang seperti perubahan bidang pertanian menjadi industry.
3. Pengangguran Siklikal atau Siklus. Pengangguran ini disebabkan dari adanya perekonomian hingga kegiatan didalamnya melemah. Dari lemahnya kegiatan ekonomi itu mengakibatkan perusahaan cenderung mengurangi tenaga kerjanya untuk menurunkan biaya produksi.
4. Pengangguran Teknologi. Pengangguran jenis ini disebabkan dari adanya perkembangan jaman yang melahirkan teknologi baru sehingga banyak perusahaan menggantikan tugas manusia dengan alat-alat yang modern.

Kemudian menurut Sukirno (2013) berdasarkan ciri-cirinya, pengangguran juga dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengangguran Terbuka. Ciri-ciri pengangguran ini adalah seseorang yang masuk dalam usia kerja namun tidak memiliki pekerjaan satupun yang memberikannya pendapatan
2. Pengangguran Tersembunyi. Ciri-ciri dari pengangguran jenis ini adalah seseorang yang berada dalam keadaan bekerja namun tidak bekerja secara efektif karena adanya kelebihan tenaga kerja disuatu pekerjaan.
3. Pengangguran yang setengah menganggur. Ciri-ciri dari pengangguran ini adalah mereka yang melakukan pekerjaan kurang dari 35 jam seminggu atau dapat dikatakan bekerja *part-time*.
4. Pengangguran Musiman. Ciri-ciri Pengangguran jenis ini adalah tenaga kerja cenderung bekerja hanya berdasarkan pada jadwal panen dan tanam pada musim tertentu.

Dalam penelitian ini akan berfokus pada pengangguran terbuka. Jadi, Pengangguran Terbuka merupakan kondisi dimana seseorang tenaga kerja tidak memiliki pekerjaan sama sekali sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengangguran ini dapat dikatakan menjadi beban keluarga serta masyarakat. Terjadinya pengangguran terbuka ini diakibatkan dari beberapa factor. Pertama, adanya faktor internal atau kondisi dimana sekumpulan orang tidak mendapatkan pekerjaan walaupun telah berusaha dengan maksimal ataupun adanya sifat malas dari seseorang untuk mencari pekerjaan lain ataupun adanya rasa malas untuk bekerja. Kedua, factor eksternal yaitu kondisi dimana adanya penambahan lowongan pekerjaan yang lebih sedikit dibandingkan jumlah tenaga kerja yang tersedia ataupun penambahan tenaga kerja yang ada. Dengan kondisi tersebut dapat menimbulkan efek dalam jangka panjang seperti mereka tidak dapat melakukan suatu pekerjaan atau dapat dikatakan sebagai pengangguran secara nyata dan separuh waktu. Factor lain dari wujud pengangguran terbuka yaitu adanya penurunan kegiatan

ekonomi yang menurun dikarenakan adanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini mengakibatkan banyaknya pengurangan penggunaan tenaga kerja. Menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka adalah persentase dari adanya jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja pada suatu wilayah yang dapat dihitung menggunakan rumus seperti berikut:

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah penduduk menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi akan menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan pekerjaan atau pasar kerja. Dapat diilustrasikan apabila persentase TPT sebuah kota sebesar 5 persen dari 100 penduduk usia produktif atau 15 tahun keatas yang tersedia untuk bekerja maka dapat dikatakan bahwa sebanyak 5 orang itu merupakan pengangguran. Sukirno (2013) menjelaskan bahwa pengangguran terbuka adalah sebuah wujud dari lebih rendahnya lapangan pekerjaan dan tingkat penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan penambahan angkatan kerjanya.

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan diakibatkan dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan, adanya ketidaksesuaian pekerjaan dengan latar belakang pendidikan tenaga kerja, dan juga adanya rasa malas untuk mencari pekerjaan. Dengan adanya kondisi lebih banyak jumlah tenaga kerja yang belum terserap oleh pasar kerja akan mengakibatkan banyaknya masalah ekonomi dan social. Mengapa demikian, karena dengan seseorang tidak memiliki pendapatan maka orang tersebut harus mengurangi pengeluarannya. Dari adanya pengurangan pengeluaran tersebut dapat menyebabkan masalah lainnya seperti kesehatan yang menurun dan terganggunya psikologis orang tersebut. Dari semua masalah yang ditimbulkan pengangguran, akan merucut pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Maka dari itu, pengangguran

dapat dinyatakan sebagai masalah dalam perekonomian yang memiliki akibat sangat buruk sehingga harus selalu diupayakan untuk mengatasinya.

2.2.2 Upah Minimum

Upah merupakan sebuah imbalan yang diberikan oleh produsen atau pemilik usaha untuk tenaga kerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya dalam kurun waktu satu bulan. Secara umum dan singkatnya upah merupakan hasil yang diperoleh para pekerja atas pekerjaan yang mereka lakukan. Upah memiliki titik minimum untuk diberikan produsen kepada pekerjanya. Hal itu disebut upah minimum. Menurut Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 yang tercantum dalam pasal 41, upah memiliki arti imbalan terkecil dimana terdiri dari upah pokok tanpa tunjangan. Upah memiliki pengaruh besar terhadap tenaga kerja. Menurut Feriyanto (2014) pengaruh yang ditimbulkan dari upah cukup besar terhadap adanya permintaan dan penawaran kerja dimana kondisi tersebut disebabkan apabila upah mengalami perubahan, maka tingkat penawaran tenaga kerjanya pun akan mengalami perubahan sesuai tinggi rendahnya upah itu. Dari hal itu, bisa dipaparkan bahwa apabila tingkat upah tinggi, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan tinggi, sedangkan jika upah rendah, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan pun juga rendah. Upah minimum memiliki pengelompokan lainnya seperti berdasarkan wilayah upah minimum dibagi menjadi dua yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota(UMK). Dengan adanya pengelompokan tersebut, upah yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya akan berbeda satu dengan yang lainnya sesuai dengan kebijakan perusahaan serta daerah dari perusahaan tersebut.

Upah seorang pekerja akan berkaitan dengan bagaimana pekerja tersebut memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan daerah mereka tinggi. dapat diilustrasikan ketika pekerja bekerja di Kota Purwokerto, kebutuhan pokoknya selama sebulan sudah cukup pada angka minimal satu juta rupiah, namun berbeda dengan pekerja di Kota Semarang, kebutuhan pokok akan berbeda sehingga angka yang

dikeluarkan untuk memenuhinya pun akan berbeda atau minimal di Kota Semarang pada angka dua juta rupiah untuk mencukupi kebutuhan pokok selama sebulan. Penetapan upah minimum Kota dilakukan oleh Wali Kota yang berdasarkan pada harga kebutuhan pokok serta kebutuhan hidup layak di wilayah tersebut. Apabila Wali Kota tidak berdasarkan pada dua kebutuhan tersebut, upah yang diberikan cenderung merugikan para pekerjanya dan dapat menyebabkan pekerjanya mengundurkan diri mencari pekerjaan lain serta tidak terpenuhinya kesejahteraan masyarakat daerah. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa adanya upah yang kecil atau tidak sesuai akan meningkatkan jumlah pengangguran yang ada.

Penerapan upah di suatu daerah tersebut secara tidak langsung akan menyejahterakan buruh dan karyawan yang bekerja. Namun, untuk para produsen, penerapan upah minimum ini memiliki kesan baik dan buruk. Kesan baik dari adanya penerapan upah ini akan terjadi ketika produsen tersebut telah siap dan mampu untuk menyediakan upah minimum sesuai daerah sehingga ia dapat meningkatkan produksi serta kualitas produk dengan biaya produksi yang cenderung tetap per periode. Sedangkan kesan buruk dari adanya penerapan upah ini akan terjadi ketika produsen tersebut cenderung belum siap dan tidak mau menerapkan upah minimum di usahanya sehingga biaya produksi mereka naik dan produsen memilih untuk mengurangi pekerjanya untuk menjaga agar menjadi biaya produksinya. Dengan kondisi ini, pemerintah daerah cenderung menjaga adanya upah yang sesuai dan dapat diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

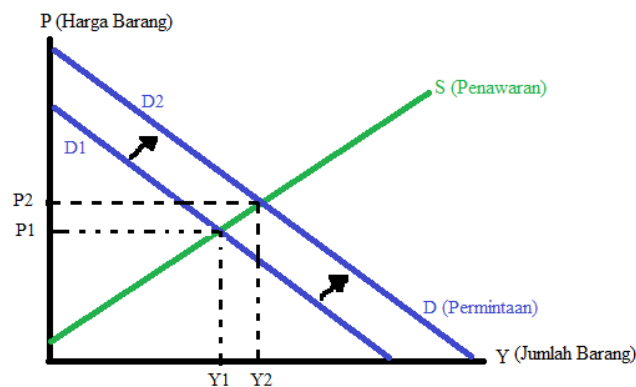
2.2.3 Inflasi

Secara umum, inflasi merupakan suatu kondisi dimana kenaikan harga barang umum mengalami kenaikan secara terus menerus dalam periode tertentu. Harga barang umum yang dimaksudkan adalah harga barang yang diproduksi dan menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki kurang lebih 200 komoditi. Sedangkan maksud dari periode tertentu adalah waktu dimana barang produksi gagal panen ataupun ada

moment tertentu seperti hari raya. Kartini (2019) menjelaskan bahwa inflasi merupakan sebuah penyakit atau masalah ekonomi pada negara yang menghambat kegiatan perekonomian negara tersebut sehingga diperlukan perhatian lebih agar tidak terjadi dalam jangka panjang. Inflasi dapat dibedakan menjadi empat golongan seperti:

1. Inflasi Ringan = inflasi yang terjadi dibawah 10 persen ($>10\%$) pertahun
2. Inflasi Sedang = inflasi yang terjadi antara 10 hingga 30 persen pertahun
3. Inflasi Berat = inflasi yang terjadi diantara 30 hingga 100 persen pertahun
4. Hyperinflasi = inflasi yang terjadi lebih dari 100 persen ($<100\%$) pertahun.

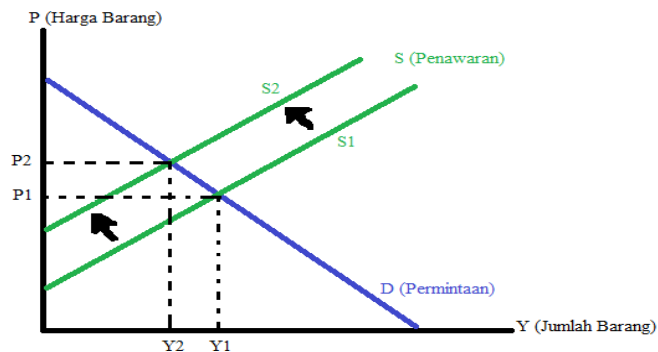
Menurut Kartini (2019) penyebab dari inflasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama inflasi karena permintaan yang meningkat (*Demand Pull Inflation*). Pemaparan kondisi ini yaitu ketika permintaan akan barang atau jasa masyarakat meningkat di pasar namun penawaran yang ada tetap, maka akan menyebabkan jumlah barang atau jasa yang tersedia sedikit dan dapat menimbulkan kelangkaan. Dari adanya kelangkaan tersebut menyebabkan perubahan harga yang ikut meningkat. Dengan adanya harga yang meningkat biasanya produsen mengurangi biaya produksinya dengan mengurangi jumlah pekerja yang dapat meyebabkan pengangguran. Kurva dari kondisi permintaan meningkat sebagai berikut;



Gambar 1. Kurva Kondisi *Demand Pull Inflation*

Gambar kurva di atas menjelaskan bahwa pergeseran kurva permintaan yang posisi awalnya ada di garis D1 menjadi ke kanan di garis D2 dikarenakan adanya perubahan harga yang terjadi dari P1 naik menjadi P2 sehingga hal tersebut juga mengubah jumlah barang yang diminta naik dari Q1 menjadi Q2. Pergeseran ini biasanya diakibatkan dari adanya perubahan pendapatan, selera serta daya beli masyarakat yang meningkat dan dapat terjadi pada moment tertentu seperti hari raya.

Penyebab inflasi yang kedua adalah adanya kenaikan biaya produksi (*Cosh Push Inflation*). Kondisi inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan biaya pada berbagai factor produksi sehingga dapat menyebabkan harga barang yang dihasilkan pun naik. Pemaparan kondisinya, naiknya biaya produksi mengakibatkan kondisi dimana penawaran akan barang atau jasa di pasar turun namun permintaan tetap sehingga dalam pasar akan terjadi kelangkaan barang yang menyebabkan harga barang itu naik. Kurva kondisi biaya produksi naik sebagai berikut:



Gambar 2. Kurva kondisi *Cosh Push Inflation*

Gambar 2. menjelaskan kondisi dimana terjadinya penurunan kurva penawaran ke arah kiri atas atau dari S1 menuju S2 yang diakibatkan karena dari kondisi awal penawaran mengalami penurunan sehingga harga barang mulai naik dari P1 menuju ke P2 dan jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang dari Y1 menjadi Y2. Turunnya

penawaran biasanya diakibatkan oleh bahan baku yang sulit didapatkan sehingga mempengaruhi harga bahan baku dan meningkatkan biaya produksi.

Inflasi dapat menyebabkan dampak yang positif dan negative untuk daerahnya. Pengelompokkan tersebut akan berdasarkan besarnya tingkatan inflasi daerah tersebut. Inflasi akan menimbulkan dampak yang positif ketika inflasi daerah tergolong dalam inflasi ringan dan sedang. Dampak yang ditimbulkan dari inflasi yaitu adanya permintaan naik yang dapat memacu penawaran serta produksi untuk naik sehingga membutuhkan bahan baku serta tenaga kerja yang banyak. Dari hal itu, pengangguran dapat terserap sehingga tingkat pengangguran terbuka menurun. Sedangkan inflasi akan menimbulkan dampak buruk atau negative ketika inflasi daerah tergolong dalam berat dan *hyper*. Dengan kondisi ini, dampak yang ditimbulkan dari inflasi adalah pendapatan riil akan lebih rendah dibandingkan pendapatan nominal sehingga terjadilah perbedaan barang yang didapat dengan nominal yang sama dalam periode tertentu. kemudian, dampak lainnya adalah pemerintah kurang lagi dipercaya oleh masyarakat karena dianggap tidak tanggap terhadap kondisi perekonomian rakyat. Dampak yang terakhir adalah masyarakat lebih memilih untuk berinvestasi tidak produktif seperti membeli tanah dan bangunan sehingga produksi menurun dan berkaitan dengan pengurangan tenaga kerja yang menyebabkan kondisi perekonomian social daerah tersebut tidak stabil.

2.2.4 Laju Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan PDRB merupakan sebuah indicator untuk menunjukkan adanya pertumbuhan produksi barang dan jasa dalam perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. Fungsi dari adanya angka laju pertumbuhan PDRB ada 2, yang pertama adalah menjadi alat ukur untuk mengukur adanya kemajuan ekonomi sebagai hasil dari pembangunan nasional dan yang kedua adalah untuk menjadi dasar dari pembuatan proyeksi penerimaan negara untuk adanya rencana pembangunan nasional

ataupun regional. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan PDRB menurut Badan Pusat Statistik Indonesia yaitu;

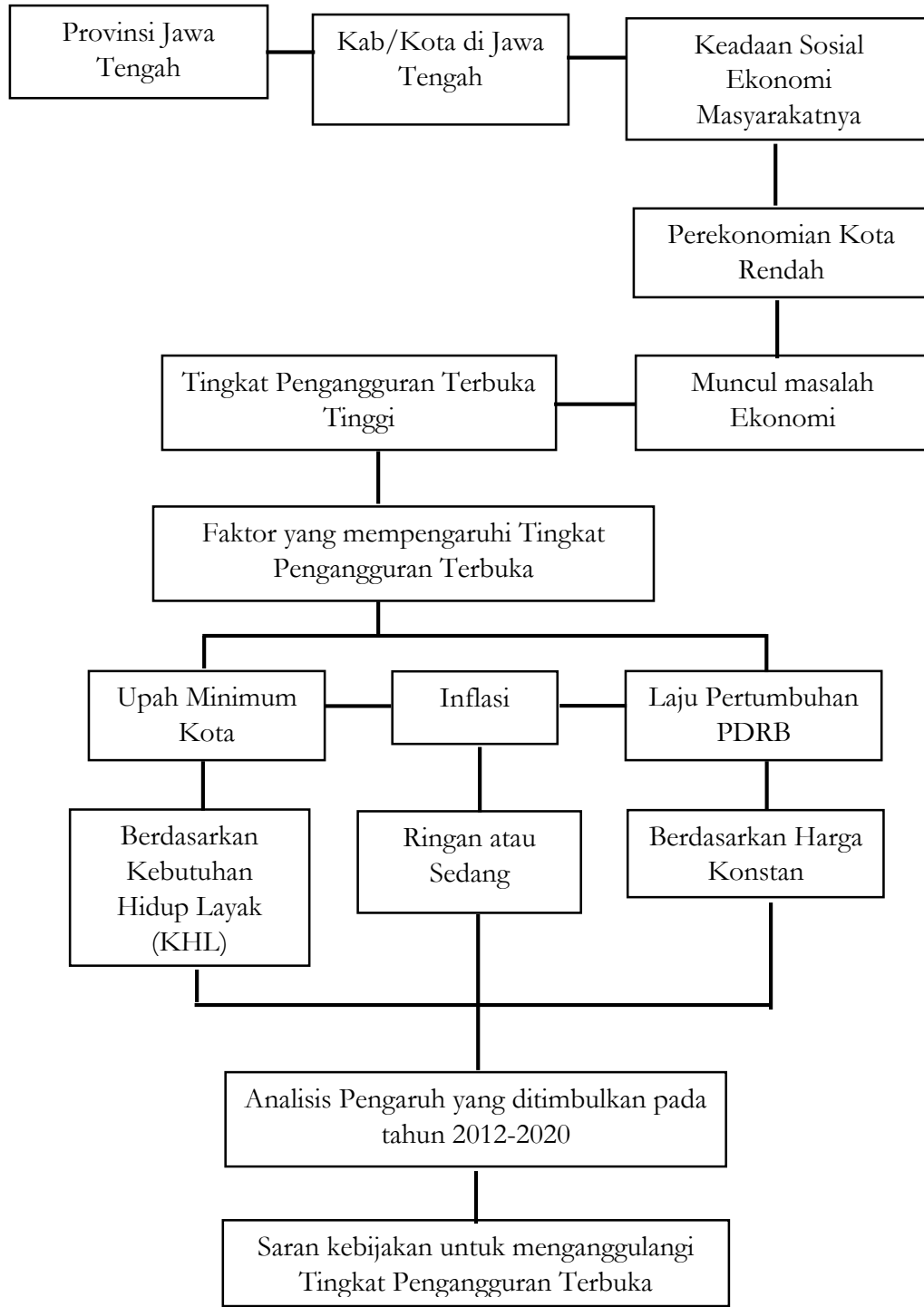
$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Laju pertumbuhan PDRB dapat juga dikatakan sebagai tolak ukur dari adanya keberhasilan pembangunan suatu daerahnya karena PDRB tersebut akan berkaitan dengan pertumbuhan penduduk serta tingkat kesempatan kerja masyarakatnya. Dengan menggunakan analisis makro, PDRB dapat dihitung berdasarkan harga konstan atau harga yang berlaku. Menurut Nainggolan (2009) PDRB atas harga konstan dinyatakan sebagai ukuran kemakmuran ekonomi daerahnya yang lebih baik karena dalam perhitungan output barang dan jasa perekonomian yang dihasilkan tidak akan dipengaruhi oleh adanya perubahan harga sedikit pun.

PDRB merupakan singkatan dari Produk Domestik Bruto. Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan PDRB adalah jumlah dari nilai tambah yang telah dihasilkan dari seluruh pelaku usaha dalam satu wilayah atau mudahnya, PRDB merupakan jumlah dari keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang telah dihasilkan oleh seluruh pelaku perekonomian di satu wilayah. Perhitungan PDRB memiliki dua tipe yaitu perhitungan PDRB dengan harga berlaku dan harga Konstan. Penggunaan harga berlaku biasanya untuk melihat tingkat inflasi yang terjadi di wilayah tersebut karena harga berlaku adalah harga yang berlaku dan digunakan setiap tahunnya berbeda. Sedangkan penggunaan harga konstan biasanya untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi karena harga konstan adalah harga yang berlaku pada 1 tahun tertentu dan dapat dijadikan sebagai patokan perhitungan tahun selanjutnya. Menurut Sukirno (2005) harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut karena perhitungan ini memperlihatkan adanya perbedaan kuantitas disetiap tahunnya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan tahun 2010.

Selain itu, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dari kenaikan output perkapita yang terjadi terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan salah satu indicator dari adanya keberhasilan pembangunan. Sehingga, dengan makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka biasanya juga akan meningkatkan adanya kesejahteraan masyarakatnya walaupun indicator lainnya adalah adanya distribusi pendapatan. Kesejahteraan masyarakat disini dapat diartikan sebagai berkurangnya pengangguran karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan tinggi maka akan berdampak pada pasar tenaga kerja atau munculnya lebih banyak lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerjanya. Namun, hal tersebut juga dapat terjadi sebaliknya. Menurut beberapa ahli, pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dan diartikan dari adanya pertumbuhan PDRB walaupun ada atau tidaknya perubahan struktur ekonomi dan kenaikan tersebut lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduknya.

2.3 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

1. Diduga upah minimum berpengaruh secara negative terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.
2. Diduga inflasi berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.
3. Diduga laju pertumbuhan PDRB berpengaruh secara negative terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini, penulis akan menggunakan data sekunder atau data yang bersumber dari penelitian-penelitian kemudian dikumpulkan melalui adanya perantara untuk disusun dan dipublikasikan oleh pihak atau instansi terkait. Data dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal, buku, dan website yang terpercaya dan relevan. Periode tahun yang dipakai untuk penelitian adalah data dari tahun 2012 hingga tahun 2020 berdasarkan ketersediaan data. Lokasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini mengambil tiga variabel independent untuk diteliti. Tiga variabel tersebut adalah upah minimum, tingkat inflasi, dan laju pertumbuhan PDRB. Variabel-variabel tersebut akan diterini pengaruhnya terhadap satu variabel dependent yaitu tingkat pengangguran terbuka. Data yang akan dipakai dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 hingga 2020.
2. Data Upah Minimum Kota di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 hingga 2020.
3. Data Inflasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 hingga 2020.
4. Data Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 hingga 2020.

3.2 Definisi Operasional Variabel

1. Pengangguran terbuka merupakan suatu kondisi individu yang dapat diartikan individu tersebut sedang mencari pekerjaan sesuai dengan keinginannya, atau merasa putus asa mendapatkan pekerjaan walaupun belum memulai, atau juga

sedang menata hidupnya untuk memulai suatu usaha. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data tingkat pengangguran terbuka kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2012-2020 dalam satuan persen.

2. Upah Minimum Kota merupakan upah terkecil atau patokan upah yang berlaku di kota-kota Provinsi Jawa Tengah yang penetapannya dilakukan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan adanya Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data besarnya upah minimum Kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2012-2020 dalam satuan rupiah.
3. Inflasi merupakan kondisi dimana terjadi peningkatan harga barang umum secara terus menerus pada periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data tingkat inflasi Kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2012-2020 dengan satuan persen.
4. Laju pertumbuhan dapat diartikan sebagai kondisi naiknya PDRB yang tidak memperdulikan kenaikan tersebut akan lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan yang berlaku pada struktur ekonomi. PDRB dapat ditimbulkan di suatu daerah dengan dua pendekatan namun dalam penelitian ini, pendekatan atau data yang digunakan adalah data laju pertumbuhan PDRB Kota di Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan 2010 pada periode penelitian tahun 2012-2020 dalam satuan persen.

Berikut merupakan persamaan model dalam penelitian ini:

$$TPT_{it} = \beta_0 + \beta_1 UMK_{it} + \beta_2 Inflasi_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

TPT_{it} = Tingkat Pengangguran Terbuka

β_0 = Harga/nilai Koefisien Konstanta

$\beta_1 \text{ LOGUMK}_{it}$ = Upah Minimum

β_2 Inflasi_{it} = Inflasi

β_3 PDRB_{it} = Laju Pertumbuhan PDRB

3.3 Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel. Data panel merupakan sebuah gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Alat yang digunakan untuk mengelola data dalam penelitian ini adalah Eviews9. Metode regresi data panel dikatakan memiliki beberapa keuntungan apabila dibandingkan dengan data *time series* dan *cross section*. Mengapa dikatakan seperti itu, karena data panel menyediakan data lebih banyak sehingga dapat menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar dan dapat mengatasi adanya masalah yang akan timbul ketika adanya masalah dalam pengolahan variabel.

Menurut Widarjono (2017) ada tiga pendekatan untuk metode data panel, yaitu:

a) *Common Effect Model*

Menurut Widarjono (2017) model *common effect* merupakan metode yang mempertimbangkan atau mengestimasi data panel dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section* yang kemudian akan di estimasi dengan model yang menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Sehingga, model dari *Common Effect* sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \epsilon_{it}$$

b) *Fixed Effect Model*

Menurut Gujarati (2003) salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperhatikan heterogenitas unit *cross section* dalam metode analisis regresi data panel adalah dengan mempersilakan adanya nilai intersep yang berbeda-beda untuk

setiap unit *cross section*nya walaupun masih berasumsi slope konstan. Sehingga, model *Fixed Effect* yang digunakan dalam penelitian adalah:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + u_{it} ; i = 1, 2, \dots, T$$

c) *Random Effect Model*

Menurut Widarjono (2017) pendekatan yang pada akhirnya akan mengurangi adanya efisiensi dari parameter yang di estimasi adalah pendekatan yang dilakukan dengan menambahkan variabel dummy ke dalam model yang dinilai dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan atau *degree of freedom*. Sehingga, dalam model *random effect*, memiliki model seperti berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

3.4 Pemilihan Model

Pemilihan model akan dilakukan dalam penelitian ini untuk menentukan model yang paling tepat. Untuk menemukan model yang paling tepat, data akan diuji dengan beberapa metode pengujian seperti *chow test* dan *hausman test*. Pengujian *chow test* akan digunakan untuk melakukan pengujian adanya keserasian data yang didapatkan dari *pooled least square* serta dari data yang didapatkan dari metode *fixed effect*. Selain itu, metode pengujian *hausman test* akan dilakukan untuk memilih model yang paling tepat dari hasil pengujian *chow test* dan metode *random effect*.

3.4.1 Chow test (uji chow)

Chow test (uji chow) merupakan sebuah pengujian untuk menentukan suatu model dari *fixed effect* atau *random effect* yang dinilai tepat untuk digunakan dalam estimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow sebagai berikut:

H0: *common effect model*

H1: *fixed effect model*

Dalam hipotesis diatas, akan didapatkan adanya penolakan dari hipotesis didasarkan pada nilai perbandingan yang tertera dalam hasil. Apabila didapatkan *P-value* yang lebih kecil (<) dari nilai α maka data akan menolak H_0 yang artinya menggunakan model *fixed effect* lebih tepat. Sedangkan sebaliknya, apabila *P-value* lebih besar (>) dari nilai α maka data menerima H_0 yang artinya menggunakan model *common effect* lebih tepat. Nilai α yang akan digunakan dalam uji ini adalah sebesar 0.1 atau 10 persen. Pengujian *chow test* ini akan dilakukan menggunakan program *Eviews*. Secara manualnya, untuk menghitung F statistic dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{\frac{(SSE_1 - SSE_2)}{(n-1)}}{\frac{SSE_2}{(nt - n - k)}}$$

Dimana:

SSE1: Sum Square Error model *common effect*

SSE2: Sum Square Error model *fixed effect*

n : Jumlah kecamatan (*cross section*)

nt : Jumlah *cross section* x jumlah time series

k : Jumlah variabel independent

3.4.2 Hausman test (uji hausman)

Uji hausman adalah sebuah pengujian yang membandingkan *fixed effect model* dengan *random effect model*. Pengujian dari kedua model akan digunakan dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan menjadi model dari regresi data panel. Untuk melakukan uji ini akan digunakan program yang serupa dengan *chow test*

yaitu menggunakan program *Eviews*. Bentuk hipotesis yang dibentuk dalam uji hausman adalah sebagai berikut:

H0: Model *random effect*

H1: Model *fixed effect*

Dari adanya hipotesis diatas akan bahwa adanya penolakan pada hipotesis akan didasarkan pada perbandingan dari pengolahan. Apabila hasil probabilitas atau *P-value* lebih kecil ($<$) dari nilai α maka data menolak H0 yang artinya model *fixed effect* lebih tepat digunakan. Sedangkan sebaliknya, apabila *P-value* lebih besar ($>$) dari nilai α maka data menerima H0 yang artinya menggunakan model *random effect* lebih tepat. Nilai α yang akan digunakan dalam uji ini adalah sebesar 5 persen.

3.5 Estimasi Model Terbaik

3.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk menentukan sebuah proporsi atau persentasi total variasi dari variabel terikat yang diperlihatkan oleh variabel bebas. Karena dalam penelitian akan menggunakan analisis regresi berganda, maka pengujian ini akan digunakan *Adjust R Square*. Pada hasil akhir uji ini dapat dilihat pada output *model summary*. Kemudian, pada kolom *Adjust R²* akan diketahui persentase yang dapat dijelaskan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat dan sisanya akan dipengaruhi atau dijelaskan variabel bebas lainnya yang tidak ada dalam model penelitian.

3.5.2 Uji Serentak (Uji f)

Perhitungan uji f dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh dari variabel bebas yang secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat. Apabila dalam uji dikatakan signifikan, maka dapat diartikan hubungan yang terjadi antar variabel dapat berlaku untuk populasi. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam uji

akan sebesar α 0.05 atau 5 persen. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel ANOVA dalam kolom sig. contohnya, apabila kita melakukan pengujian dengan tingkat dignifikasi sebesar α 0.05 atau 5 persen dan didapatkan hasil apabila nilai probabilitas < 0.1 maka menurut Widarjono (2017) dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antar variabel, dan sebaliknya. Uji f memiliki dasar untuk mengambil keputusan dari perhitungannya seperti apabila probabilitas lebih besar ($>$) dari nilai α 0.05 atau 5 persen atau F hitung lebih kecil ($<$) dari F tabel maka dapat diartikan bahwa hipotesis akan menerima H_0 yang dilakukan secara simultan. Sedangkan apabila probabilitas lebih kecil ($<$) dari nilai α 0.05 atau 5 persen atau F hitung lebih besar ($>$) dari F tabel maka dapat diartikan bahwa hipotesis akan menolak H_0 yang dilakukan secara simultan.

3.5.3 Uji Statistik (Uji t)

Uji t merupakan uji yang dilakukan untuk membandingkan nilai besaran t-hitung dengan t-tabel pada setiap variabel independent untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel dependennya. Pada uji t, untuk mengambil keputusan memiliki dasar. Dasar pengambilan bila dilakukan uji secara parsial yaitu jika probabilitas lebih besar ($>$) daripada α 0.05 atau 5 persen ataupun T hitung didapatkan lebih kecil ($<$) dari T tabel, maka diartikan bahwa menerima H_0 . Sedangkan kebalikannya, jika probabilitas lebih kecil ($<$) daripada α 0.05 atau 5 persen atau T hitung lebih besar ($>$) daripada nilai T tabel maka dapat diartikan menolak H_0 . Perbandingan tersebut harus dilihat setiap variabelnya.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian untuk skripsi ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia, jurnal-jurnal terkait, dan website yang relevan dengan penelitian ini. Tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah untuk meneliti adanya pengaruh dari tiga variabel independent seperti upah minimum, inflasi, dan laju pertumbuhan PDRB terhadap satu variabel dependennya yaitu tingkat pengangguran terbuka. Penulis melakukan penelitian ini menggunakan periode waktu tujuh tahun yang dimulai dari tahun 2012 hingga berakhir di tahun 2020.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian adalah metode data panel yang merupakan gabungan data dari *time series* dan *cross section*. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Penelitian ini menggunakan data tingkat pengangguran terbuka tahun 2012-2020 di Provinsi Jawa Tengah setiap Kabupaten/Kota nya sebagai variabel terikat.

2. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

- a. Upah Minimum; data yang dipakai pada penelitian ini adalah data upah minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2020 dengan menggunakan satuan nominal uang rupiah.
- b. Inflasi; data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terjadi setiap tahunnya dari tahun 2012-2020 dengan menggunakan satuan persen.
- c. Laju Pertumbuhan PDRB; data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data laju pertumbuhan PDRB yang berdasarkan harga konstan tahun 2010

menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2020 dengan menggunakan satuan persen.

Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

	N	Y	X1	X2	X3
Mean	315	5.22	1386237.775	4.08	4.93
Minimum	315	1.5	765000	0.4	0.23
Maximum	315	11.98	2715000	10.46	23.54
Std. Deviation	315	1.79	406052.7108	2.23	1.82

Sumber: data diolah ms. excel 2013

Tabel di atas memperlihatkan bahwa variabel dependen penelitian Y yaitu tingkat pengangguran terbuka memiliki nilai maksimum yang cukup besar sebesar 11.98. Selain itu, nilai mean dari variabel tersebut sebesar 5.22 dengan standar deviasi sebesar 1.79 yang diketahui bahwa variabel Y memiliki standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai mean variabel sehingga dapat dikatakan bahwa selama periode penelitian ini, variabel Y (tingkat pengangguran terbuka) mengalami penyebaran yang merata.

Variabel X1 (upah minimum) dalam tabel memiliki nilai mean sebesar 1386237.7 dengan nilai standar deviasi sebesar 406052.7. Dari nilai tersebut memperlihatkan bahwa nilai standar deviasinya lebih besar dibandingkan nilai mean sehingga dapat dikatakan bahwa selama periode penelitian ini, variabel X1 (upah minimum) mengalami penyebaran data yang tidak merata.

Variabel X2 (inflasi) pada tabel memperlihatkan nilai mean variabelnya sebesar 4.08 dengan nilai standar deviasinya sebesar 2.23 dimana nilai mean variabel lebih besar dibandingkan nilai standar deviasinya sehingga dapat dikatakan bahwa selama periode penelitian ini, variabel X2 (inflasi) mengalami penyebaran data yang merata.

Variabel X3 (laju pertumbuhan PDRB) sesuai tabel di atas memiliki nilai mean sebesar 4.93 dan standar deviasinya sebesar 1.82. Nilai ini memperlihatkan bahwa nilai mean variabelnya lebih besar dibandingkan nilai standar deviasinya sehingga dapat dikatakan bahwa selama periode penelitian ini, variabel X3 (laju pertumbuhan PDRB) mengalami penyebaran data yang merata.

4.2 Hasil dan Pemilihan Model Terbaik

4.2.1 Uji Chow Test

Tabel 4.2 Hasil Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	13.174610	(34,276)	0.0000
Cross-section Chi-square	302.791184	34	0.0000

Sumber: data diolah views 9

Hipotesis yang dipakai untuk olah data hasil diatas yaitu:

H0 : Memilih model *Common Effects*

H1 : Memilih model *Fixed Effects*

Dari hasil pengolahan *uji chow test* diatas, data menunjukkan besaran probabilitas yang dapat dilihat dari tingkat *p-value* datanya sebesar 0.0000. Dari nilai tersebut terlihat bahwa tingkat *p-value* lebih kecil 0.05 atau 5 persen sehingga dari hipotesis yang ada menyimpulkan bahwa data menolak H0 dan menerima H1 atau dapat diartikan bahwa model *Fixed Effects* lebih tepat digunakan dalam penelitian dibandingkan dengan model *Common Effects*.

4.2.2 Uji Hausman Test

Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.453884	3	0.6930

Sumber: data diolah eviews 9

Hipotesis yang dipakai untuk olah data hasil diatas yaitu:

H0 : Memilih model *Random Effects*

H1 : Memilih model *Fixed Effects*

Dari hasil pengolahan *uji hausman test* diatas, hasilnya menunjukkan besaran probabilitas tingkat *p-value* datanya sebesar 0.6930. Dari nilai tersebut terlihat bahwa tingkat *p-value* lebih besar dibandingkan α 0.05 atau 5 persen sehingga dari hipotesis yang ada menyimpulkan bahwa data menerima H0 dan menolak H1 atau dapat diartikan bahwa model *Random Effects* lebih tepat digunakan dalam penelitian dibandingkan dengan model *Fixed Effects*.

Setelah dilakukannya tiga pengujian untuk menentukan model terbaik ini, penulis mendapatkan hasil bahwa dalam penelitian ini model terbaik dan yang tepat untuk digunakan adalah *Random Effects Model*.

4.3 Model Regresi Random Effects Model

Tabel 4.4 Hasil Pengujian *Random Effects Model*

Var	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob.
C	6.179206	0.565227	10.93225	0.0000
X1	-0.0000000362	0.0000000223	-1.623921	0.1054
X2	0.109420	0.037728	2.900208	0.0040
X3	-0.183056	0.040953	-4.469914	0.0000

Sumber: data diolah views 9

Setelah menemukan model terbaik yang dapat dipakai dalam penelitian, berikut merupakan hasil dari model persamaan untuk penelitian ini:

$$Y_{it} = \beta_0i + \beta_1X_{1it} + \beta_2X_{2it} + \beta_3X_{3it} + e_{it}$$

$$Y = 6.179206 - 0.0000000362X_1 + 0.109420X_2 - 0.183056X_3$$

Keterangan:

Y = TPT

β_0 = Koefisien

X1 = Upah Minimum Kota

X2 = Inflasi

X3 = Laju Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan persamaan regresi diatas, diketahui nilai koefisien konstanta sebesar 6.179206 yang artinya ketika variabel upah minimum, inflasi, dan laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sama dengan nol maka tingkat pengangguran terbukanya akan sebesar 6.179206 jiwa.

Penjabarannya, pertama nilai koefisien regresi dari upah minimum sebesar -0.0000000362. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketika upah minimum naik 1 juta

rupiah, maka tingkat pengangguran terbuka akan mengalami penurunan sebesar - 0.000000362 persen jika variabel bebas lainnya pada keadaan konstan.

Kedua, nilai koefisien regresi dari inflasi sebesar 0.109420. Nilai ini dapat menunjukkan bahwa ketika inflasi naik sebesar 1 persen, maka tingkat pengangguran terbuka akan mengalami peningkatan sebesar 0.109 persen jika variabel lainnya pada keadaan konstan.

Ketiga, nilai koefisien regresi dari laju pertumbuhan PDRB sebesar -0.183056. nilai ini menunjukkan bahwa ketika laju pertumbuhan PDRB naik sebesar 1 persen, maka tingkat pengangguran terbuka akan mengalami penurunan sebesar -0.183 persen jika variabel lainnya dalam keadaan konstan.

4.4 Analisis Regresi Model

4.4.1 Koefisien Determinasi (*R-squared*)

Tabel 4.5 Hasil Koefisien Determinasi (*R-Squared*)

Variabel	Probabilitas
X1	0.118559
X2	
X3	

Sumber: data diolah eviews 9

Dari hasil pengolahan data, didapatkan nilai koefisien deteminasi (*R-squared*) sebesar 0.118559 yang memiliki arti bahwa variabel-variabel independennya seperti upah minimum, inflasi, dan laju pertumbuhan PDRB mampu menjelaskan sebesar 11.85 persen variabel dependennya yaitu tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model.

4.4.2 Uji Serentak (Uji F)

Tabel 4.6 Hasil Uji Serentak (uji f)

Variabel	Probabilitas
X1	0.000000
X2	
X3	

Sumber: data diolah eviews 9

Pengujian uji F ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh bersamaan variabel-variabel independent pada penelitian terhadap variabel dependennya. Berdasarkan hasil pengolahan data seperti diatas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas f-statistiknya sebesar 0.000000. Nilai Probabilitas dari hasil olah data tersebut ternyata kurang dari α 0.05 atau 5 persen sehingga dapat diartikan bahwa variabel independent dalam data seperti upah minimum, inflasi, dan laju pertumbuhan PDRB secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya tingkat pengangguran terbuka.

4.4.3 Uji Statistik (Uji t)

Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik (Uji t)

Variabel	Alfa (α)	Probabilitas	Keterangan
X1	0.05	0.1054	Tidak Signifikan
X2	0.05	0.0040	Signifikan
X3	0.05	0.0000	Signifikan

Sumber: data diolah eviews 9

Dari rangkuman data diatas, dapat dijabarkan untuk pengujian uji t pada setiap variabel independennya sebagai berikut:

5. X1 merupakan variabel upah minimum. Dalam pengolahan datanya, X1 memiliki nilai koefisien sebesar -0.000000362 dan probabilitas sebesar 0.1054.

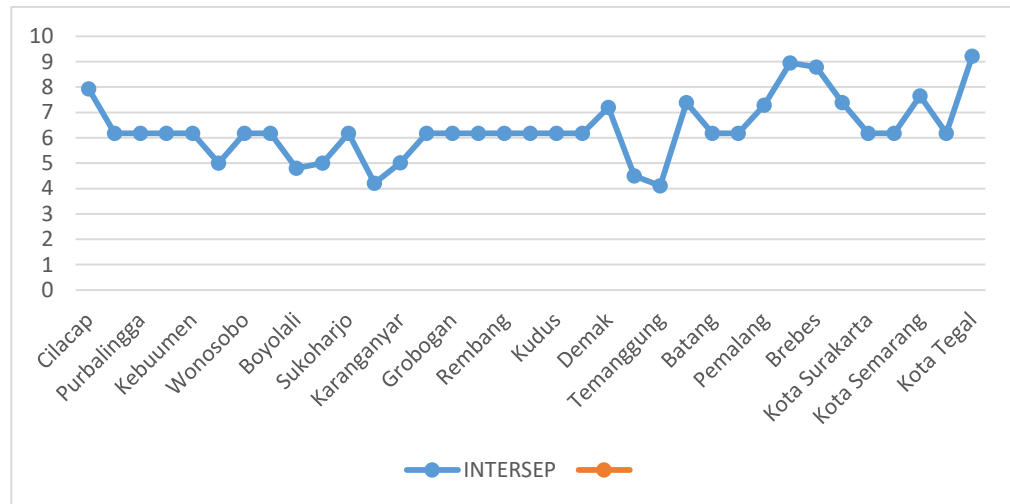
Nilai probabilitasnya lebih dari α 0.05 atau 5 persen sehingga dapat diartikan bahwa variabel upah minimum berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependennya tingkat pengangguran terbuka. Hasil ini menyatakan bahwa variabel upah minimum tidak sesuai dengan hipotesis atau tidak terbukti berpengaruh terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.

6. X2 merupakan variabel inflasi. Setelah pengolahan data didapatkan X2 memiliki nilai koefisien sebesar 0.109420 dan probabilitas sebesar 0.0040. Dengan nilai tersebut dapat diketahui bahwa nilai probabilitas X2 kurang dari α 0.05 persen atau 5 persen sehingga dapat diartikan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel dependennya tingkat pengangguran terbuka. Hasil ini menyatakan bahwa variabel inflasi sesuai dengan hipotesis atau terbukti memiliki pengaruh terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.
7. X3 merupakan variabel laju pertumbuhan PDRB. Dari pengolahan data didapatkan X3 memiliki nilai koefisien sebesar -0.183056 dan probabilitas sebesar 0.0000. Dari hasil ini, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas X3 kurang dari α 0.05 atau 5 persen sehingga dapat diartikan bahwa variabel laju pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan dan negative terhadap variabel dependennya tingkat pengangguran terbuka. Hal ini menyatakan bahwa variabel laju pertumbuhan PDRB sesuai dengan hipotesis atau terbukti memiliki pengaruh terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.

4.5 Analisis antar Kabupaten/Kota

Dibawah ini merupakan hasil dari interpretasi konstanta dari masing-masing Kabupaten/Kota:

Grafik 4.1 Intersep Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2012-2020



sumber: data diolah ms. excel 2013

Dalam grafik antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah diatas, diketahui bahwa kabupaten/kota yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi adalah Kota Tegal dengan nilai sebesar 9.221 persen. Sedangkan yang memiliki tingkat pengangguran terendah adalah Kabupaten Temanggung sebesar 4.108 persen pada periode penelitian dan kondisi variabel bebas lainnya pada keadaan konstan.

Hal ini dikarenakan Kota Tegal memiliki angka kemiskinan yang paling rendah namun, memiliki angka tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan Kota Tegal memiliki orientasi pada sektor pertanian kurang lebih sebesar 48% sehingga sebagian masyarakatnya tergolong sebagai pengangguran yang hanya memiliki pekerjaan dan penghasilan sesaat. Selain itu, masyarakat tegal lebih banyak memilih bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran di Kota Tegal lebih

memilih menunggu pekerjaan di luar negeri dibandingkan bekerja di sektor-sektor dalam daerahnya. dari keadaan-keadaan tersebut Kota Tegal dikatakan unik pada periode penelitian ini karena memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, namun tingkat kemiskinannya rendah.

Sedangkan daerah yang memiliki tingkat pengangguran terendah pada periode penelitian ini adalah Kabupaten Temanggung. Hasil ini juga ditandai dari adanya kondisi di daerah tersebut yang memiliki kecenderungan untuk bekerja dalam sektor industry pengolahan seperti kayu dan kopi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung lebih berorientasi pada sector padat karya dibandingkan padat usaha. Hal ini menyebabkan lebih banyaknya pemberdayaan dan penyerapan tenaga kerja di lingkup Kabupaten Temanggung. Pemerintah Temanggung bergerak secara aktif untuk melakukan pembangunan-pembangunan yang bersifat membangun dan memprioritaskan sektor unggulan berupa hasil sumber daya alamnya untuk diolah oleh sumber daya manusianya. Kondisi ini tercermin dari adanya peningkatan pemberdayaan pada beberapa sektor seperti pertanian, infrastuktur dan UMKM yang tergolong dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan berkualitas.

4.6 Pembahasan

Hasil yang didapatkan penulis setelah melakukan pengolahan data terkait yaitu:

1. Hubungan variabel upah minimum dan pengangguran adalah negative sesuai dengan hipotesis, namun berdasarkan tingkat signifikansi alfa 5% upah tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Lindiarta (2014) yang menyatakan bahwa upah tidak berpengaruh terhadap pengangguran sebab dengan dugaan parameter upah riil tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap permintaan tenaga kerjanya dikarenakan sifat upah yang kaku sehingga keadaan upah tidak akan langsung berubah ketika ada suatu perubahan dan akan merespon pada jangka panjang. Pada Provinsi Jawa tengah, walaupun tingkat upah setiap tahunnya mengalami

kenaikan, namun menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, jumlah pencari kerja di daerahnya lebih banyak dibandingkan lapangan kerjanya sehingga terjadilah kondisi dimana tingkat upah di Provinsi Jawa Tengah pada periode penelitian tidak mempengaruhi signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbukanya.

2. Variabel inflasi sesuai dengan hipotesis yaitu berpengaruh signifikan dan positif. Hal ini sesuai dengan penelitian Setiawan dan Putro (2013) bahwa semakin tinggi tingkat inflasi disuatu daerah, maka dapat mengakibatkan adanya penurunan pada tingkat pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menyebabkan tingkat pengangguran meningkat. Menurut Pramastuti (2018) fokus utama pemerintah negara maju adalah tingkat pengangguran sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia, fokus utama pemerintah yaitu pada tingkat inflasi. Kartini (2019) mengungkapkan bahwa naik ataupun turunnya inflasi akan mengikuti pertumbuhan ekonomi daerahnya sehingga pemerintah harus menjaga kestabilan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah tergolong relatif stabil karena pertumbuhan rata-ratanya sekitar 4 persen sedangkan pertumbuhan tingkat penganggurannya rata-rata sekitar 5.2 persen sehingga dapat dikatakan pada periode penelitian di Provinsi Jawa Tengah, tingkat inflasi yang tinggi mempengaruhi naiknya tingkat pengangguran terbukanya.
3. Variabel Laju pertumbuhan PDRB sesuai dengan hipotesis yaitu laju Pertumbuhan PDRB berpengaruh signifikan dan negative. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Setiawan dan Putro (2013) yang menyatakan bahwa ketika kenaikan tingkat pengangguran terjadi, maka kondisi tersebut akan menurunkan pertumbuhan PDRB, dan begitu juga sebaliknya. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kondisi ini juga dapat disebabkan karena pemerintah Provinsi Jawa Tengah berorientasi pada pembangunan perekonomian daerahnya terlebih pada 5 sektor seperti pertanian, perdagangan, perikanan, industri pengolahan, dan konstruksi dimana sektor-

sektor tersebut menyerap besar tenaga kerja dan menghasilkan sebagian besar pendapatan untuk masyarakat daerahnya. Dengan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan perekonomian pada sektor-sektor tersebut menyerap tingkat pengangguran di daerahnya atau dapat dikatakan tingginya tingkat laju pertumbuhan PDRB berpengaruh dalam penurunan pengangguran di Provinsi Jawa Tengah pada periode penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

- 1) Variabel upah minimum tidak memiliki pengaruh signifikan dan negative terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2012-2020. Hasil ini dapat diartikan bahwa upah minimum tidak memiliki pengaruh yang nyata pada tingkat pengangguran terbuka di daerah dan periode penelitian.
- 2) Variabel inflasi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2012-2020. Hasil ini diartikan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif yang nyata atau menyebabkan kondisi ketika inflasi naik, maka tingkat pengangguran terbuka pada daerah dan periode penelitian pun naik.
- 3) Variabel laju pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh signifikan dan negative terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2012-2020. Hasil ini dapat diartikan bahwa laju pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh negative yang nyata atau menyebabkan kondisi ketika laju pertumbuhan PDRB naik, maka tingkat pengangguran terbuka pada daerah dan periode penelitian akan mengalami penurunan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kondisi yang terjadi, maka berikut beberapa kebijakan yang dapat dipertimbangkan dan dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mengurangi dan menekan tingkat pengangguran terbukanya sehingga dapat menciptakan stabilitas perekonomian nasional maupun regionalnya:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat berperan secara aktif untuk memberikan pengembangan terhadap daerahnya dengan memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam didalamnya untuk dikelola sumber daya manusianya sehingga dapat meningkatkan adanya Kewirausahaan daerah atau UMKM daerah atau dapat dikatakan pemerintah dapat meningkatkan investasi keadaan ini pada padat karya.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat memperketat kebijakan-kebijakan terkait untuk menekan angka inflasi di daerahnya dengan menyesuaikan kondisi nasionalnya dengan regionalnya pada jangka panjang. Kebijakan-kebijakan tersebut seperti penetapan harga maksimum dan pengawasan akan produksi.
3. Pemerintah Daerah lebih mengembangkan sektor-sektor besar di Provinsi Jawa Tengah yang telah menjadi penopang perekonomiannya seperti pertanian, perdagangan, perikanan, industry pengolahan, dan konstruksi sehingga ke lima sektor ini dapat menyerap tenaga kerjanya secara besar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan karya ini, penulis mengalami beberapa keterbatasan yang dapat menjadi pembelajaran bagi para peneliti lainnya untuk menyempurnakan penelitiannya. Pada penelitian ini, keterbatasan yang dialami penulis yaitu pada data variabel laju pertumbuhan PDRB tahun 2020 masih merupakan perhitungan sementara dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah sehingga dapat dikatakan masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPS), B. P. (2021). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jakarta: BPS RI/BPS-Statistic Indonesia.
- BPS Jateng. (2022, Januari 31). *IHK dan Inflasi 6 Kota SBH 2022*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah:
<https://jateng.bps.go.id/indicator/3/48/1/ihk-dan-inflasi-6-kota-sbh.html>
- fauziah, R. N. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa (tahun2010-2015). *Jurnal Ekonomi* .
- Feriyanto, N. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometri Dasar. Terjemahan Sumarsono Zain*. Jakarta: Erlangga.
- Hartanto, T. B., & Masjkuri, S. U. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*.
- Hendaryanto, M. N. (2018). Faktor Determinan Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah (2010-2016). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Jateng, B. (2022, Januari 31). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah :
<https://jateng.bps.go.id/indicator/6/64/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt.html>
- Jateng, B. (2022, Januari 31). *Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah* . Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah:
<https://jateng.bps.go.id/indicator/6/708/2/kebutuhan-hidup-layak-dan-upah-minimum-kabupaten-kota-.html>
- Kartini, S. (2019). *Mengenal Inflasi*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Lindiarta, A. (2014). Analisis Pengaruh Tingkat Upah Minimum, Inflasi, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran di Kota Malang (1996-2013). *Jurnal Ilmiah* .

- Nainggolan, I. O. (2009). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Thesis Ketenagakerjaan. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Pramastuti, N. A. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah periode 2011-2015. *Jurnal Ekonomi*.
- Pramastuti, N. A. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah . *Skripsi* .
- Setiawan, A. (2013). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi dan Beban/Tanggungans Penduduk Terhadap Pengangguran Terbukan di Kota Magelang Periode tahun 1990-2010. *Jurnal Ekonomi Vo. 2 No 3*, 1-14.
- Setyaningrum, M. D., Hendrati, I. M., & Asmara, K. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2019. *Jurnal Studi Bisnis dan Administrasi Vo.3 No.2* .
- Sukirno, S. (2005). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, S. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wardiansyah, M., Yulmardi, & Bahri, Z. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran (Studi Kasus Provinsi-Provinsi se-Sumatera). *Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 5 No.1* .
- Widarjono, A. (2017). *Ekonometrika; Pengantar dan Aplikasi Disertai Panduan Eviews* . Yogyakarta: UPP STIM YKPN .
- Widiyati, R. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota-kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

LAMPIRAN

Lampiran I: Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	<i>Y</i>	<i>X1</i>	<i>X2</i>	<i>X3</i>
Mean	5.223174603	1386237.775	4.088190476	4.93184127
Standard Error	0.100965115	22878.47841	0.125925849	0.102915881
Median	4.95	1396000	3.05	5.36
Mode	4.63	1000000	2.66	5.44
Standard Deviation	1.791953019	406052.7108	2.23496211	1.826575694
Sample Variance	3.211095622	1.64879E+11	4.995055632	3.336378765
Kurtosis	0.192285338	-0.6509183	-0.14533055	34.03598169
Skewness	0.544124756	0.305607061	1.127558088	2.661920184
Range	10.48	1950000	10.06	23.31
Minimum	1.5	765000	0.4	0.23
Maximum	11.98	2715000	10.46	23.54
Sum	1645.3	436664899	1287.78	1553.53
Count	315	315	315	315
Largest(2)	9.83	2498587	9.87	10.36
Smallest(2)	1.5	770000	0.41	0.59
Confidence Level (0.95%)	0.198653679	45014.49753	0.247765114	0.202491905

Lampiran II: Hasil Regresi *Common Effects Model*

Dependent Variabel: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 03/05/22 Time: 12:28
Sample: 2012 2020
Included observations: 9
Cross-sections included: 35
Total pool (unbalanced) observations: 314

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.504782	0.727388	7.567871	0.0000
X1?	-3.89E-08	3.17E-07	-0.122859	0.9023
X2?	0.142112	0.055759	2.548677	0.0113
X3?	-0.164326	0.056575	-2.904574	0.0039
R-squared	0.055300	Mean dependent var	5.220701	
Adjusted R-squared	0.046158	S.D. dependent var	1.794274	
S.E. of regression	1.752375	Akaike info criterion	3.972478	
Sum squared resid	951.9537	Schwarz criterion	4.020241	
Log likelihood	-619.6791	Hannan-Quinn criter.	3.991563	
F-statistic	6.048867	Durbin-Watson stat	0.563762	
Prob(F-statistic)	0.000516			

Lampiran III: Hasil Regresi *Fixed Effects Model*

Dependent Variabel: Y?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 03/05/22 Time: 12:28
 Sample: 2012 2020
 Included observations: 9
 Cross-sections included: 35
 Total pool (unbalanced) observations: 314

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.241149	0.518843	12.02897	0.0000
X1?	-3.92E-07	2.24E-07	-1.744755	0.0821
X2?	0.106440	0.037836	2.813163	0.0053
X3?	-0.184942	0.041314	-4.476535	0.0000
Fixed Effects				
(Cross)				
_CILACAP--C	1.881272			
_BANYUMAS--C	0.084985			
_PURBALINGGA--				
C	-0.015842			
_BANJARNEGAR				
A--C	-0.767325			
_KEBUMEN--C	-0.801550			
_PURWOREJO--C	-1.263335			
_WONOSOBO--C	-0.728336			
_MAGELANG--C	-0.893430			
_BOYOLALI--C	-1.481346			
_KLATEN--C	-1.264041			
_SUKOHARJO--C	-0.601356			
_WONOGIRI--C	-2.128947			
_KARANGANYAR				
--C	-1.247421			
_SRAGEN--C	-0.286761			
_GROBOGAN--C	-1.064171			
_BLORA--C	-0.459926			
_REMBANG--C	-0.698113			
_PATI--C	0.388191			
_KUDUS--C	-0.447748			

_JEPARA--C	-0.842100
_DEMAK--C	1.099861
_SEMARANG--C	-1.809403
_TEMANGGUNG-- C	-2.233525
_KENDAL--C	1.313990
_BATANG--C	-0.048694
_PEKALONGAN-- C	-0.099576
_PEMALANG--C	1.192045
_TEGAL--C	2.991538
_BREBES--C	2.801601
_KOTAMAGELAN G--C	1.298301
_KOTASURAKAR TA--C	0.385756
_KOTASALATIGA --C	0.378070
_KOTASEMARAN G--C	1.600863
_KOTAPEKALON GAN—C	0.499631
_KOTATEGAL--C	3.276284

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variabels)

R-squared	0.639834	Mean dependent var	5.220701
Adjusted R-squared	0.591551	S.D. dependent var	1.794274
S.E. of regression	1.146721	Akaike info criterion	3.224736
Sum squared resid	362.9312	Schwarz criterion	3.678484
Log likelihood	-468.2835	Hannan-Quinn criter.	3.406045
F-statistic	13.25173	Durbin-Watson stat	1.463839
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran IV: Hasil Regresi *Random Effects Model*

Dependent Variabel: Y?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 03/05/22 Time: 12:29

Sample: 2012 2020

Included observations: 9

Cross-sections included: 35

Total pool (unbalanced) observations: 314

Swamy and Arora estimator of component variances

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.179206	0.565227	10.93225	0.0000
X1?	-3.62E-07	2.23E-07	-1.623921	0.1054
X2?	0.109420	0.037728	2.900208	0.0040
X3?	-0.183056	0.040953	-4.469914	0.0000
Random Effects				
(Cross)				
_CILACAP--C	1.744630			
_BANYUMAS--C	0.079552			
_PURBALINGGA--C	-0.014366			
_BANJARNEGAR				
A--C	-0.708867			
_KEBUMEN--C	-0.742370			
_PURWOREJO--C	-1.169947			
_WONOSOBO--C	-0.674147			
_MAGELANG--C	-0.830472			
_BOYOLALI--C	-1.374876			
_KLATEN--C	-1.172269			
_SUKOHARJO--C	-0.558869			
_WONOGIRI--C	-1.972112			
_KARANGANYAR				
--C	-1.157622			
_SRAGEN--C	-0.263874			
_GROBOGAN--C	-0.985404			
_BLORA--C	-0.428052			
_REMBANG--C	-0.644874			
_PATI--C	0.361550			

_KUDUS--C	-0.418468
_JEPARA--C	-0.784614
_DEMAK--C	1.015678
_SEMARANG--C	-1.685656
_TEMANGGUNG-- C	-2.070722
_KENDAL--C	1.214160
_BATANG--C	-0.040882
_PEKALONGAN-- C	-0.094440
_PEMALANG--C	1.108039
_TEGAL--C	2.776765
_BREBES--C	2.602480
_KOTAMAGELAN G--C	1.206517
_KOTASURAKAR TA--C	0.357837
_KOTASALATIGA --C	0.347661
_KOTASEMARAN G--C	1.473571
_KOTAPEKALON GAN—C	0.461754
_KOTATEGAL--C	3.042709

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	1.373997	0.5894
Idiosyncratic random	1.146721	0.4106

Weighted Statistics

R-squared	0.118559	Mean dependent var	1.401227
Adjusted R-squared	0.110028	S.D. dependent var	1.212393
S.E. of regression	1.143700	Sum squared resid	405.4952
F-statistic	13.89888	Durbin-Watson stat	1.310586
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.052110	Mean dependent var	5.220701
Sum squared resid	955.1684	Durbin-Watson stat	0.556380

Lampiran V: Hasil Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	13.174610	(34,276)	0.0000
Cross-section Chi-square	302.791184	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variabel: Y?

Method: Panel Least Squares

Date: 03/05/22 Time: 12:29

Sample: 2012 2020

Included observations: 9

Cross-sections included: 35

Total pool (unbalanced) observations: 314

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.504782	0.727388	7.567871	0.0000
X1?	-3.89E-08	3.17E-07	-0.122859	0.9023
X2?	0.142112	0.055759	2.548677	0.0113
X3?	-0.164326	0.056575	-2.904574	0.0039

R-squared	0.055300	Mean dependent var	5.220701
Adjusted R-squared	0.046158	S.D. dependent var	1.794274
S.E. of regression	1.752375	Akaike info criterion	3.972478
Sum squared resid	951.9537	Schwarz criterion	4.020241
Log likelihood	-619.6791	Hannan-Quinn criter.	3.991563
F-statistic	6.048867	Durbin-Watson stat	0.563762
Prob(F-statistic)	0.000516		

Lampiran VI: Hasil Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.453884	3	0.6930

Cross-section random effects test comparisons:

Variabel	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1?	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.2379
X2?	0.106440	0.109420	0.000008	0.2970
X3?	-0.184942	-0.183056	0.000030	0.7292

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variabel: Y?

Method: Panel Least Squares

Date: 03/05/22 Time: 12:30

Sample: 2012 2020

Included observations: 9

Cross-sections included: 35

Total pool (unbalanced) observations: 314

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.241149	0.518843	12.02897	0.0000
X1?	-3.92E-07	2.24E-07	-1.744755	0.0821
X2?	0.106440	0.037836	2.813163	0.0053
X3?	-0.184942	0.041314	-4.476535	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variabels)

R-squared	0.639834	Mean dependent var	5.220701
Adjusted R-squared	0.591551	S.D. dependent var	1.794274
S.E. of regression	1.146721	Akaike info criterion	3.224736
Sum squared resid	362.9312	Schwarz criterion	3.678484
Log likelihood	-468.2835	Hannan-Quinn criter.	3.406045
F-statistic	13.25173	Durbin-Watson stat	1.463839
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran VII: Perbedaan intersep antar kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

KABUPATEN/KOTA	INTERSEP	C	KONSTANTA
Kabupaten Cilacap	7.923836	6.179206	1.744630
Kabupaten Banyumas	6.179206	6.179206	0.079552
Kabupaten Purbalingga	6.179206	6.179206	-0.014366
Kabupaten Banjarnegara	6.179206	6.179206	-0.708867
Kabupaten Kebumen	6.179206	6.179206	0.742370
Kabupaten Purworejo	5.009259	6.179206	-1.169947
Kabupaten Wonosobo	6.179206	6.179206	0.674147
Kabupaten Magelang	6.179206	6.179206	-0.830472
Kabupaten Boyolali	4.804330	6.179206	-1.374876
Kabupaten Klaten	5.006937	6.179206	-1.172269
Kabupaten Sukoharjo	6.179206	6.179206	-0.558869
Kabupaten Wonogiri	4.207094	6.179206	-1.972112
Kabupaten Karanganyar	5.021584	6.179206	-1.157622
kabupaten Sragen	6.179206	6.179206	-0.263874
Kapaten Grobogan	6.179206	6.179206	-0.985404
Kabupaten Blora	6.179206	6.179206	-0.428052
Kabupaten Rembang	6.179206	6.179206	-0.644874
Kabupaten Pati	6.179206	6.179206	0.361550
Kabupaten Kudus	6.179206	6.179206	-0.418468
Kabupaten Jepara	6.179206	6.179206	-0.784614
Kabupaten Demak	7.194884	6.179206	1.015678
Kabupaten Semarang	4.493550	6.179206	-1.685656
Kabupaten Temanggung	4.108484	6.179206	-2.070722
Kabupaten Kendal	7.393366	6.179206	1.214160
Kabupaten Batang	6.179206	6.179206	-0.040882
Kabupaten Pekalongan	6.179206	6.179206	-0.094440

Kabupaten Pemasang	7.287245	6.179206	1.108039
Kabupaten Tegal	8.955971	6.179206	2.776765
Kabupaten Brebes	8.781686	6.179206	2.602480
Kota Magelang	7.385723	6.179206	1.206517
Kota Surakarta	6.179206	6.179206	0.357837
Kota Salatiga	6.179206	6.179206	0.347661
Kota Semarang	7.652777	6.179206	1.473571
Kota Pekalongan	6.179206	6.179206	0.461754
Kota Tegal	9.221915	6.179206	3.042709

Lampiran VIII: Data Penelitian

Tahun	Kabupaten/Kota	Y	X1	X2	X3
2012	Kab Cilacap	7.29	773000	6.87	1.98
2013	Kab Cilacap	6.68	887667	8.37	1.66
2014	Kab Cilacap	5.65	1016667	8.19	2.92
2015	Kab Cilacap	8.01	1195667	2.63	5.96
2016	Kab Cilacap	7.89	1527000	2.77	5.09
2017	Kab Cilacap	6.30	1693689	4.41	2.58
2018	Kab Cilacap	7.49	1841209	3.21	2.99
2019	Kab Cilacap	7.24	1989058	2.19	2.27
2020	Kab Cilacap	9.10	2158327	1.71	10.36
2012	Kab Banyumas	5.11	795000	4.73	5.11
2013	Kab Banyumas	5.45	877500	8.50	5.45
2014	Kab Banyumas	5.37	1000000	7.09	5.37
2015	Kab Banyumas	6.37	1100000	2.52	6.37
2016	Kab Banyumas	6.37	1350000	2.42	6.05
2017	Kab Banyumas	4.62	1461400	3.91	6.34
2018	Kab Banyumas	4.15	1589000	2.98	6.45
2019	Kab Banyumas	4.17	1750000	2.28	6.32
2020	Kab Banyumas	6.00	1900000	1.90	1,65
2012	Kab Purbalingga	5.02	818500	4.09	5.19
2013	Kab Purbalingga	5.63	896500	9.57	5.27
2014	Kab Purbalingga	5.13	1023000	9.08	4.85

2015	Kab Purbalingga	4.84	1101600	1.62	5.47
2016	Kab Purbalingga	4.63	1377000	2.39	4.85
2017	Kab Purbalingga	5.33	1522500	3.72	5.37
2018	Kab Purbalingga	6.02	1655200	3.01	5.42
2019	Kab Purbalingga	4.73	1788500	2.59	5.65
2020	Kab Purbalingga	6.10	1940800	3.00	1.23
2012	Kab Banjarnegara	3.69	765000	4.55	5.23
2013	Kab Banjarnegara	4.16	835000	8.35	5.44
2014	Kab Banjarnegara	4.06	920000	7.78	5.31
2015	Kab Banjarnegara	5.05	1125000	2.97	5.47
2016	Kab Banjarnegara	4.63	1265000	2.27	5.44
2017	Kab Banjarnegara	4.72	1370000	3.67	5.65
2018	Kab Banjarnegara	3.99	1490000	3.04	5.67
2019	Kab Banjarnegara	4.44	1610000	2.68	5.6
2020	Kab Banjarnegara	5.86	1748000	2.65	1.32
2012	Kab Kebumen	3.58	770000	4.64	4.88
2013	Kab Kebumen	3.52	835000	10.46	4.57
2014	Kab Kebumen	3.25	975000	7.36	5.79
2015	Kab Kebumen	4.14	1157500	2.91	6.28
2016	Kab Kebumen	4.14	1300000	2.71	5.01
2017	Kab Kebumen	5.58	1445000	3.25	5.15
2018	Kab Kebumen	5.48	1573000	3.01	5.53
2019	Kab Kebumen	4.69	1700000	2.18	5.52
2020	Kab Kebumen	6.07	1845000	3.03	1.46
2012	Kab Purworejo	3.20	809000	3.66	4.59
2013	Kab Purworejo	5.15	849000	7.14	4.94
2014	Kab Purworejo	5.10	910000	8.48	4.48
2015	Kab Purworejo	4.00	1165000	3.45	5.33
2016	Kab Purworejo	4.01	1324600	2.66	5.15
2017	Kab Purworejo	3.64	1433900	4.29	5.27
2018	Kab Purworejo	4.43	1560000	3.10	5.33
2019	Kab Purworejo	2.91	1686000	2.47	5.44
2020	Kab Purworejo	4.04	1835000	2.47	1.66
2012	Kab Wonosobo	5.21	825000	3.84	4.7
2013	Kab Wonosobo	5.82	880000	8.82	4
2014	Kab Wonosobo	5.34	990000	8.44	4.78
2015	Kab Wonosobo	4.47	1166000	2.71	4.67
2016	Kab Wonosobo	4.47	1326000	2.97	5.36

2017	Kab Wonosobo	4.18	1457100	3.21	4.14
2018	Kab Wonosobo	3.50	1585000	3.53	5.06
2019	Kab Wonosobo	3.43	1712500	2.90	5.61
2020	Kab Wonosobo	5.37	1859000	2.95	1.66
2012	Kab Magelang	4.38	870000	2.59	4.88
2013	Kab Magelang	6.13	942000	8.34	5.91
2014	Kab Magelang	7.45	1152000	7.91	5.38
2015	Kab Magelang	5.16	1255000	3.60	5.18
2016	Kab Magelang	2.91	1410000	2.86	5.39
2017	Kab Magelang	2.44	1570000	3.47	5.5
2018	Kab Magelang	2.89	1742000	2.66	5.28
2019	Kab Magelang	3.07	1882000	2.12	5.3
2020	Kab Magelang	4.27	2042200	2.52	1.68
2012	Kab Boyolali	4.43	836000	3.45	5.33
2013	Kab Boyolali	5.44	895000	8.21	5.83
2014	Kab Boyolali	4.95	1160000	7.45	5.42
2015	Kab Boyolali	2.03	1197800	2.58	5.96
2016	Kab Boyolali	2.03	1403500	2.65	5.33
2017	Kab Boyolali	3.67	1529289	2.19	5.8
2018	Kab Boyolali	2.18	1651650	3.08	5.72
2019	Kab Boyolali	3.09	1790000	2.75	5.96
2020	Kab Boyolali	5.28	1942500	2.75	1.24
2012	Kab Klaten	3.70	812000	3.65	5.71
2013	Kab Klaten	5.34	871500	7.92	5.96
2014	Kab Klaten	4.75	1026600	7.76	5.84
2015	Kab Klaten	2.51	1170000	2.57	5.3
2016	Kab Klaten	2.51	1400000	2.12	5.17
2017	Kab Klaten	4.35	1528500	3.12	5.34
2018	Kab Klaten	3.14	1661632	2.39	5.47
2019	Kab Klaten	3.54	1795061	2.61	5.5
2020	Kab Klaten	5.46	1947821	2.61	1.18
2012	Kab Sukoharjo	6.10	843000	4.22	5.9
2013	Kab Sukoharjo	5.98	902000	8.42	5.78
2014	Kab Sukoharjo	4.60	1150000	7.93	5.4
2015	Kab Sukoharjo	4.52	1223000	2.69	5.69
2016	Kab Sukoharjo	4.52	1396000	2.34	5.72
2017	Kab Sukoharjo	2.27	1513000	3.40	5.76
2018	Kab Sukoharjo	2.72	1648000	2.31	5.79

2019	Kab Sukoharjo	3.39	1783500	2.86	5.92
2020	Kab Sukoharjo	6.93	1938000	2.86	1.7
2012	Kab Wonogiri	3.46	775000	3.43	5.94
2013	Kab Wonogiri	3.61	830000	8.60	4.78
2014	Kab Wonogiri	3.45	954000	7.20	5.26
2015	Kab Wonogiri	3.07	1101000	2.13	5.4
2016	Kab Wonogiri	3.07	1293000	2.91	5.25
2017	Kab Wonogiri	2.38	1401000	2.32	5.32
2018	Kab Wonogiri	2.28	1542000	2.63	5.41
2019	Kab Wonogiri	2.55	1655000	2.75	5.14
2020	Kab Wonogiri	4.27	1797000	2.75	1.41
2012	Kab Karanganyar	5.82	846000	3.29	5.9
2013	Kab Karanganyar	3.84	896500	8.70	5.69
2014	Kab Karanganyar	3.54	1060000	7.38	5.22
2015	Kab Karanganyar	3.60	1226000	2.40	5.05
2016	Kab Karanganyar	3.60	1420000	1.93	5.4
2017	Kab Karanganyar	3.17	1560000	3.15	5.77
2018	Kab Karanganyar	2.28	1696000	2.48	5.98
2019	Kab Karanganyar	3.12	1833000	2.01	5.93
2020	Kab Karanganyar	5.96	1989000	2.01	1.87
2012	Kab Sragen	5.88	810000	3.74	3.74
2013	Kab Sragen	5.63	864000	7.55	7.55
2014	Kab Sragen	6.04	960000	8.51	8.51
2015	Kab Sragen	4.51	1105000	3.05	3.05
2016	Kab Sragen	4.51	1300000	2.49	5.77
2017	Kab Sragen	4.55	1422585	3.18	5.97
2018	Kab Sragen	4.83	1546492	2.49	5.75
2019	Kab Sragen	3.32	1673500	2.44	5.9
2020	Kab Sragen	4.75	1815914	2.44	1.81
2012	Kab Grobogan	4.20	785000	4.48	5.08
2013	Kab Grobogan	6.10	842000	7.88	4.57
2014	Kab Grobogan	4.25	935000	8.03	4.07
2015	Kab Grobogan	5.22	1160000	3.31	5.96
2016	Kab Grobogan	5.22	1305000	2.40	4.51
2017	Kab Grobogan	3.02	1435000	4.05	5.85
2018	Kab Grobogan	2.22	1560000	2.89	5.83
2019	Kab Grobogan	3.54	1685500	2.82	5.37
2020	Kab Grobogan	4.50	1830000	2.82	1.59

2012	Kab Blora	4.75	855500	3.55	4.9
2013	Kab Blora	6.23	932000	7.94	5.36
2014	Kab Blora	4.30	1009000	7.13	4.39
2015	Kab Blora	4.68	1180000	2.85	5.36
2016	Kab Blora	4.68	1328500	2.14	23.54
2017	Kab Blora	2.85	1438100	2.98	5.98
2018	Kab Blora	3.30	1564000	2.78	4.38
2019	Kab Blora	3.82	1690000	2.62	4.05
2020	Kab Blora	4.89	1834000	2.62	4.66
2012	Kab Rembang	5.75	816000	4.28	5.32
2013	Kab Rembang	5.97	896000	6.88	5.43
2014	Kab Rembang	5.23	985000	7.59	5.15
2015	Kab Rembang	4.51	1120000	2.66	5.5
2016	Kab Rembang	4.51	1328500	1.73	5.28
2017	Kab Rembang	3.19	1408000	3.31	6.98
2018	Kab Rembang	2.83	1535000	2.53	5.89
2019	Kab Rembang	3.60	1660000	2.46	5.2
2020	Kab Rembang	4.83	1802000	2.46	1.49
2012	Kab Pati	11.98	837500	3.92	5.93
2013	Kab Pati	7.29	927600	7.57	5.97
2014	Kab Pati	6.37	1013027	8.01	4.64
2015	Kab Pati	4.43	1176500	3.23	6.01
2016	Kab Pati	4.43	1310000	2.28	5.49
2017	Kab Pati	3.83	1420500	3.51	5.67
2018	Kab Pati	3.57	1585000	2.77	5.71
2019	Kab Pati	3.64	1742000	2.51	5.86
2020	Kab Pati	4.74	1891000	2.51	1.15
2012	Kab Kudus	5.89	889000	4.77	4.11
2013	Kab Kudus	8.07	990000	8.31	4.36
2014	Kab Kudus	5.03	1150000	8.59	4.43
2015	Kab Kudus	5.04	1380000	3.28	3.88
2016	Kab Kudus	4.63	1608200	2.32	2.54
2017	Kab Kudus	3.56	1740900	4.17	3.21
2018	Kab Kudus	3.28	1892500	3.11	3.24
2019	Kab Kudus	3.80	2044467	3.02	3.1
2020	Kab Kudus	5.53	2218451	1.24	3.53
2012	Kab Jepara	4.29	800000	4.52	5.86
2013	Kab Jepara	6.34	875000	7.95	5.39

2014	Kab Jepara	5.09	1000000	9.87	4.81
2015	Kab Jepara	3.12	1150000	4.57	5.1
2016	Kab Jepara	3.12	1350000	3.45	5.06
2017	Kab Jepara	4.84	1600000	2.83	5.39
2018	Kab Jepara	3.75	1739360	4.20	5.85
2019	Kab Jepara	2.92	1879031	4.31	6.02
2020	Kab Jepara	6.70	2040000	3.85	1.94
2012	Kab Demak	8.40	893000	4.10	4.46
2013	Kab Demak	7.08	995000	8.22	5.27
2014	Kab Demak	5.17	1280000	8.69	4.29
2015	Kab Demak	6.02	1535000	2.80	5.93
2016	Kab Demak	6.02	1745000	2.78	5.09
2017	Kab Demak	4.47	1900000	3.57	5.82
2018	Kab Demak	7.03	1065490	2.73	5.4
2019	Kab Demak	5.42	2240000	2.85	5.36
2020	Kab Demak	7.31	2432000	2.85	0.23
2012	Kab Semarang	4.87	941600	4.56	6.03
2013	Kab Semarang	3.90	1051000	8.11	5.97
2014	Kab Semarang	4.38	1208200	8.63	5.85
2015	Kab Semarang	2.57	1419000	2.85	5.52
2016	Kab Semarang	2.57	1610000	2.32	5.3
2017	Kab Semarang	1.78	1745000	3.67	5.65
2018	Kab Semarang	2.25	1900000	2.80	5.67
2019	Kab Semarang	2.54	2055000	2.93	5.39
2020	Kab Semarang	4.57	2229880	1.49	2.67
2012	Kab Temanggung	3.39	866000	4.73	4.27
2013	Kab Temanggung	4.87	940000	7.01	5.2
2014	Kab Temanggung	3.19	1050000	7.81	5.03
2015	Kab Temanggung	1.50	1178000	2.74	5.24
2016	Kab Temanggung	1.50	1313000	2.40	5.02
2017	Kab Temanggung	2.97	1431500	3.12	5.02
2018	Kab Temanggung	3.23	1557000	2.89	5.13
2019	Kab Temanggung	2.98	1682027	2.66	5.05
2020	Kab Temanggung	3.85	1825200	2.66	2.13
2012	Kab Kendal	6.31	893000	3.89	5.21
2013	Kab Kendal	6.43	953100	6.90	6.22
2014	Kab Kendal	6.15	1206000	8.34	5.14
2015	Kab Kendal	7.07	1383450	4.13	5.21

2016	Kab Kendal	7.07	1639600	2.16	5.56
2017	Kab Kendal	4.93	1774867	3.60	5.78
2018	Kab Kendal	6.02	1929458	2.16	5.77
2019	Kab Kendal	6.26	2084393	2.58	5.71
2020	Kab Kendal	7.56	2262775	2.58	1.53
2012	Kab Batang	5.88	880000	3.83	1.56
2013	Kab Batang	7.02	970000	8.08	1.56
2014	Kab Batang	7.42	1146000	7.66	1.57
2015	Kab Batang	4.56	1270000	2.94	1.58
2016	Kab Batang	5.82	1467500	2.24	1.59
2017	Kab Batang	5.83	1603000	3.44	1.59
2018	Kab Batang	4.20	1749900	2.36	1.59
2019	Kab Batang	4.11	1900000	2.45	1.59
2020	Kab Batang	6.92	2061700	2.42	1.6
2012	Kab Pekalongan	5.08	873000	2.96	4.81
2013	Kab Pekalongan	4.78	962000	8.18	5.99
2014	Kab Pekalongan	6.03	1145000	8.32	4.95
2015	Kab Pekalongan	5.10	1271000	3.42	4.78
2016	Kab Pekalongan	5.10	1463000	2.96	5.19
2017	Kab Pekalongan	4.39	1583697	4.01	5.44
2018	Kab Pekalongan	4.36	1721637	3.08	5.76
2019	Kab Pekalongan	4.35	1859885	2.80	5.35
2020	Kab Pekalongan	6.97	2018161	2.83	1.89
2012	Kab Pemasang	4.85	793000	4.04	5.32
2013	Kab Pemasang	6.48	908000	6.52	5.57
2014	Kab Pemasang	7.44	1066000	7.38	5.52
2015	Kab Pemasang	6.53	1193400	3.52	5.58
2016	Kab Pemasang	6.53	1325000	2.31	5.43
2017	Kab Pemasang	5.59	1460000	3.64	5.61
2018	Kab Pemasang	6.17	1588000	2.95	5.69
2019	Kab Pemasang	6.45	1718000	2.69	5.8
2020	Kab Pemasang	7.64	1865000	2.69	0.66
2012	Kab Tegal	6.12	795000	4.13	5.23
2013	Kab Tegal	6.89	850000	7.79	6.73
2014	Kab Tegal	8.47	1000000	8.48	5.03
2015	Kab Tegal	9.52	1155000	3.64	5.49
2016	Kab Tegal	9.52	1373000	4.10	5.92
2017	Kab Tegal	7.33	1487000	3.58	5.38

2018	Kab Tegal	8.24	1617000	2.95	5.51
2019	Kab Tegal	8.12	1747000	2.51	5.58
2020	Kab Tegal	9.82	1896000	2.51	1.74
2012	Kab Brebes	8.22	775000	4.61	4.58
2013	Kab Brebes	9.61	859000	9.83	5.91
2014	Kab Brebes	9.53	1000000	6.20	5.3
2015	Kab Brebes	6.49	1166550	3.08	5.98
2016	Kab Brebes	6.49	1310000	2.84	5.11
2017	Kab Brebes	8.04	1418100	4.24	5.65
2018	Kab Brebes	7.20	1542000	3.09	5.26
2019	Kab Brebes	7.39	1665850	2.28	5.72
2020	Kab Brebes	9.83	1807614	2.28	0.59
2012	Kota Magelang	8.99	837000	4.30	5.37
2013	Kota Magelang	6.75	901500	7.79	6.04
2014	Kota Magelang	7.38	1037000	7.92	4.98
2015	Kota Magelang	6.43	1211000	2.70	5.11
2016	Kota Magelang	4.63	1341000	2.23	5.23
2017	Kota Magelang	6.68	1453000	3.90	5.42
2018	Kota Magelang	4.78	1580000	2.65	5.46
2019	Kota Magelang	4.37	1707000	2.19	5.44
2020	Kota Magelang	8.59	1853000	2.29	2.45
2012	Kota Surakarta	6.29	864450	2.87	5.58
2013	Kota Surakarta	7.22	974000	8.32	6.25
2014	Kota Surakarta	6.16	1170000	8.01	5.28
2015	Kota Surakarta	4.53	1222400	2.56	5.44
2016	Kota Surakarta	4.53	1418000	2.15	5.35
2017	Kota Surakarta	4.47	1534985	3.10	5.7
2018	Kota Surakarta	4.35	1668700	2.45	5.75
2019	Kota Surakarta	4.16	1802700	2.94	5.78
2020	Kota Surakarta	7.92	1956200	1.38	1.74
2012	Kota Salatiga	6.84	901396	4.12	5.53
2013	Kota Salatiga	6.21	1209100	7.67	6.3
2014	Kota Salatiga	4.46	1423500	7.84	5.57
2015	Kota Salatiga	6.43	1287000	2.61	5.17
2016	Kota Salatiga	5.42	1450953	2.19	5.27
2017	Kota Salatiga	3.96	1596844	3.50	5.58
2018	Kota Salatiga	4.23	1735930	2.47	5.84
2019	Kota Salatiga	4.33	1875325	2.29	5.9

2020	Kota Salatiga	7.44	2034915	2.10	1.68
2012	Kota Semarang	6.01	991500	0.41	5.97
2013	Kota Semarang	6.02	980000	8.19	6.25
2014	Kota Semarang	7.76	1165000	8.53	6.31
2015	Kota Semarang	5.77	1685000	2.56	5.82
2016	Kota Semarang	6.61	1909000	2.32	5.89
2017	Kota Semarang	6.62	2125000	3.64	6.7
2018	Kota Semarang	5.21	2310087	2.76	6.48
2019	Kota Semarang	4.50	2498587	2.93	6.81
2020	Kota Semarang	9.57	2715000	1.49	1.61
2012	Kota Pekalongan	7.67	899500	3.55	5.61
2013	Kota Pekalongan	5.28	860000	7.40	5.91
2014	Kota Pekalongan	5.42	1044000	7.82	5.48
2015	Kota Pekalongan	4.10	1291000	3.46	5
2016	Kota Pekalongan	4.63	1500000	2.94	5.36
2017	Kota Pekalongan	5.05	1623750	3.61	5.32
2018	Kota Pekalongan	6.08	1765178	2.92	5.69
2019	Kota Pekalongan	5.80	1906922	2.76	5.5
2020	Kota Pekalongan	7.02	2072000	2.36	1.87
2012	Kota Tegal	8.75	795000	0.40	4.21
2013	Kota Tegal	9.32	914276	5.80	5.67
2014	Kota Tegal	9.20	1066603	7.40	5.04
2015	Kota Tegal	8.06	1206000	3.95	5.45
2016	Kota Tegal	8.06	1385000	2.71	5.49
2017	Kota Tegal	8.19	1499500	4.03	5.95
2018	Kota Tegal	7.81	1630500	3.08	5.87
2019	Kota Tegal	8.08	1762000	2.56	5.77
2020	Kota Tegal	8.40	1925000	2.36	2.25

Keterangan:

Y = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

X1 = Upah Minimum Kota (Rupiah)

X2 = Inflasi Kota (%)

X3 = Laju Pertumbuhan PDRB (%)